



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun ...

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provisi Kalimantan Timur Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat P-RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II ...

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2019, dijadikan sebagai:

- a. penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan mengacu pada rencana kerja pemerintah; dan
- b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2019, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2019 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan;
BAB	II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
BAB	III	Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
BAB	IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB	V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB	VI	Penutup.

(2) Sistematika ...

- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Juli 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUWANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 18 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 21

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2019**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1- 1
1.1. Latar Belakang	1- 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1- 3
1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	1- 6
1.4. Maksud dan Tujuan	1- 8
BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	2- 1
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu	2- 1
2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2- 1
2.1.2 Aspek Pelayanan Umum	2- 18
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	2- 63
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2- 70
BAB 3 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	3- 1
3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	3- 1
3.1.1 Perkembangan Perekonomian Global dan Nasional	3- 1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur	3- 2
3.1.3 Perekonomian Kabupaten Kutai Timur	3- 4
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3- 6
3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	3- 7
3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	3- 11
3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	3- 17



BAB 4	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4 – 1
4.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019	4 – 1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	4 – 7
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019	4 – 8
BAB 5	PENDANAAN DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	5 – 1
5.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	5 – 1
5.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	5 – 8
BAB 6	PENUTUP	6 – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2018 (Juta Rp)	2 – 3
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 – 2018 (Juta Rp)	2 – 5
Tabel 2.3	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2018 (Juta Rp)	2 – 6
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 7
Tabel 2.5	Kategori Desa Berdasarkan Skor IPD	2 – 9
Tabel 2.6	Kategori Desa di Kabupaten Kutai Timur 2015 dan 2017	2 – 10
Tabel 2.7	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan Tahun 2016-2018	2 – 12
Tabel 2.8	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 12
Tabel 2.9	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017	2 – 15
Tabel 2.10	Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2018	2 – 16
Tabel 2.11	Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016–2018	2 – 17
Tabel 2.12	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur 2016-2018	2 – 19
Tabel 2.13	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 20
Tabel 2.14	Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2016-2018	2 – 21
Tabel 2.15	Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018 (%)	2 – 23
Tabel 2.16	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018 (%)	2 – 24
Tabel 2.17	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 25
Tabel 2.18	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 26
Tabel 2.19	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 27
Tabel 2.20	Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 27



Tabel 2.21	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 29
Tabel 2.22	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 33
Tabel 2.23	Sarana Peribadatan di Kabupaten Kutai Timur 2015-2017	2 – 34
Tabel 2.24	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2018	2 – 36
Tabel 2.25	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017	2 – 37
Tabel 2.26	Capaian Aspek Pelayanan Umum Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017	2 – 37
Tabel 2.27	Capaian Aspek Pelayanan Umum Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 38
Tabel 2.28	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 40
Tabel 2.29	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 40
Tabel 2.30	Regulasi Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 41
Tabel 2.31	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup Tahun Kabupaten Kutai Timur 2016-2018	2 – 42
Tabel 2.32	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 42
Tabel 2.33	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 43
Tabel 2.34	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 43
Tabel 2.35	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 44
Tabel 2.36	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 45
Tabel 2.37	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2017	2 – 45
Tabel 2.38	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2018	2 – 46



Tabel 2.39	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 47
Tabel 2.40	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 48
Tabel 2.41	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 49
Tabel 2.42	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 49
Tabel 2.43	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 50
Tabel 2.44	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 50
Tabel 2.45	Luas Lahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 52
Tabel 2.46	Produksi Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 53
Tabel 2.47	Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 54
Tabel 2.48	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 57
Tabel 2.49	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 57
Tabel 2.50	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 57
Tabel 2.51	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 60
Tabel 2.52	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pengawasan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 60
Tabel 2.53	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 61
Tabel 2.54	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 62
Tabel 2.55	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 62
Tabel 2.56	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 63
Tabel 2.57	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 64
Tabel 2.58	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 65



Tabel 2.59	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 66
Tabel 2.60	Capaian Aspek Daya Saing Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 66
Tabel 2.61	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kutai Timur 2015-2017	2 – 67
Tabel 2.62	Angka Kriminialitas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017	2 – 67
Tabel 2.63	Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 69
Tabel 2.64	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Kutai Timur	2 – 72
Tabel 3.1	Nilai Sektor dalam PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2018 (dalam juta Rupiah)	3 – 5
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 (dalam rupiah)	3 – 10
Tabel 3.3	Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (dalam rupiah)	3 – 16
Tabel 3.4	Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 (dalam rupiah)	3 – 18
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur	5 – 3
Tabel 5.2	Target Indikator Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur	5 – 8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2018	2 – 8
Gambar 2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2018	2 – 13
Gambar 2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2018	2 – 14
Gambar 2.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2018	2 – 20
Gambar 2.5	Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018	2 – 22
Gambar 4.1	Keterpaduan Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur	4 – 24



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada pasal 343 ayat 1 dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau; b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disusun perubahan RKPD perubahan. Berikut adalah beberapa kondisi yang mendasari dilakukan Perubahan RKPD:

- a. Situasi perkembangan ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian nasional dan regional. Kondisi tersebut menyebabkan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada penurunan Pendapatan Daerah.
- b. Beberapa faktor penting lainnya yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pergeseran kegiatan antar perangkat



- daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
- c. Adanya perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 menjadi pedoman penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2019 yang selanjutnya mendasari penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2019. Perubahan RKPD 2019 dilakukan guna mengakomodasi adanya perubahan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pada Pendapatan Daerah tahun 2019 terdapat proyeksi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penurunan proyeksi pendapatan daerah tersebut berimplikasi pada rasionalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019. Disamping itu perubahan RKPD tahun 2019 tetap memperhatikan optimalisasi penyerapan anggaran belanja Perangkat Daerah tahun 2019 khususnya pada pelaksanaan program dan kegiatan selama semester 1 tahun 2019.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting, antara lain: (a) mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan tahun 2019 sebagai tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021; (b) menjadi referensi penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah; (c) menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan tahun 2019 guna menyusun Perubahan RAPBD tahun 2019; dan (d) menjadi acuan dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat arah kebijakan pembangunan yang mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Disamping itu, Perubahan RKPD tahun 2019 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Substansi Perubahan RKPD tetap mengacu kepada RPJMD dan RPJPD serta



memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 meliputi (a) penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2019, berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah; (b) perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2019, berdasarkan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan (c) penetapan Perubahan RKPD tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.



1.3 Sistematika dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD tahun rencana beserta perubahannya dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.



II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Menguraikan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja RPJMD hingga tahun 2018. Hal ini dilakukan untuk:

- a) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral;
- b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun 2019 semester I

III. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi makro antara lain mencakup:

- 1) Perubahan kerangka ekonomi makro;
- 2) Perubahan kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2019

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengemukakan tentang perubahan terkait dengan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas



pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

V. PENDANAAN DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan serta memuat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan.

VI. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD ini untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Sehingga Perubahan RKPD 2019 ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi:

1. Penyusunan Perubahan Renja-Perangkat Daerah, KUPA dan Perubahan PPAS, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.



BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjabarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengetahui aktivitas ekonomi yang tercermin pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini merupakan parameter prestasi ekonomi serta dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya alam dan tenaga kerja beserta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada nilai tiap-tiap sektornya.

Data PDRB disajikan dalam dua klasifikasi, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB-ADHB merupakan nilai tambah barang/jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. Adapun PDRB-ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB-ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB-ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan perekonomian kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun terakhir tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang

mendukungnya, diantaranya sektor Pertambangan dan Galian, serta sektor Pertanian. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan sektor pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan sektor pertambangan khususnya batubara tahun 2014-2018, yakni 81,76 persen (2014) meskipun menurun menjadi 80,90 persen (2018) dari total PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur dengan migas dan batubara.

Perkembangan PDRB-ADHB Kabupaten Kutai Timur dengan migas pada tahun 2014-2018 dengan migas dan batubara berturut-turut yaitu sebesar Rp97.024.451,90 juta; Rp93.492.172,43 juta; Rp89.955.892,62 juta; Rp117.816.985,40 dan Rp123.531.562,42. Adapun perkembangan PDRB-ADHB pada periode yang sama berturut-turut sebesar Rp83.597.148,80 juta; Rp84.707.482,11 juta; Rp85.571.498,43 juta; Rp86.458.545,40 dan Rp88.148.883,38 juta. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara pada periode yang sama cenderung melambat dari 3,59 persen tahun 2014 menjadi 1,90 persen (angka sangat sementara) pada tahun 2018 (Tabel 2.1).

Kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir masih dipengaruhi oleh komoditi pertambangan khususnya batubara yang kontribusinya mencapai 80,90 persen dari nilai PDRB tahun 2018. Batubara menjadi andalan Kabupaten Kutai Timur karena produksi dari komoditas tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri. Hal ini menempatkan Kutai Timur sebagai salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur. Namun dalam 3 tahun sebelumnya harga komoditas batubara pernah mengalami penurunan drastis khususnya tahun 2016, maka berakibat pada pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang semakin melambat. Selanjutnya mulai tahun 2017 hingga 2018 pertumbuhan Kutai Timur mulai mengalami pertumbuhan positif.



Tabel 2.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2014-2018 (Juta Rp)

Tahun	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas & Batubara (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara
2014	97.024.451,90	83.597.148,80	96.461.592,50	83.227.493,80	23.531.972,40	17.978.326,30	3,55	3,59	5,73
2015	93.492.172,43	84.707.482,11	93.063.274,62	84.348.324,35	24.748.577,65	18.491.713,40	1,33	1,35	2,86
2016	94.921.969,38	83.795.053,74	94.529.316,25	83.445.708,60	26.582.533,13	18.750.494,62	1,07	-1,07	1,41
2017 ^{a)}	117.816.985,40	86.458.545,40	117.453.051,42	86.163.714,88	31.065.953,33	19.444.194,28	3,18	3,26	3,70
2018 ^{b)}	123.531.562,42	88.148.883,38	123.152.955,62	87.803.532,53	33.282.965,81	20.012.983,64	1,96	1,90	2,93

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Keterangan: ^{a)} BPS Provinsi Kalimantan Timur 2019

^{b)} Angka Sangat Sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019

B. Struktur Ekonomi

Peranan sektor Pertambangan dan Galian masih menjadi sektor yang dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah dalam 5 (lima) tahun terakhir bergerak turun dari 81,77 persen tahun 2014, turun menjadi 80,90 persen pada tahun 2018. Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi sektor ini menyumbang sebesar 7,72 persen pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 8,06 persen pada tahun 2018. Selanjutnya urutan ketiga sektor Industri pengolahan menyumbang sebesar 2,60 persen tahun 2014 menjadi 3,22 persen pada tahun 2018. Pergeseran dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian tersebut diharapkan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur menuju kabupaten yang maju dalam sektor agribisnis dan agroindustri.

Ditinjau dari kontribusi sektoral atau PDRB menurut lapangan usaha, nilai PDRB ADHB selama periode 2014-2018 mengalami fluktuasi. Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan penurunan dari 81,77 persen (tahun 2014) menjadi 80,90 persen (tahun 2018). Rata-rata selama lima tahun (2014-2018), kontribusi terbesar pada Sektor Pertambangan dan Penggalian telah menyumbang nilai PDRB sebesar 80,80 persen. Sedangkan kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,05 persen. Selanjutnya, Industri Pengolahan menyumbang sebesar 2,94 persen, diikuti Sektor Konstruksi 2,1 persen; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,71 persen; sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,08 persen. Sementara sektor-sektor yang lainnya (12 sektor) mempunyai kontribusi dibawah 1 persen.



Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014–2018 (Juta Rp)

No	Sektor Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	7.492.825,30	7.583.997,54	8.225.267,10	9.129.987,80	9.952.662,71
2	Pertambangan dan Penggalian	79.332.261,10	75.081.902,86	75.207.223,14	96.064.874,80	99.937.948,04
3	Industri Pengolahan	2.520.049,10	2.559.942,56	2.826.950,49	3.585.906,20	3.973.272,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.384,40	6.443,58	8.608,66	10.468,30	12.404,39
5	Pengadaan Air	10.922,60	11.576,19	12.666,34	13.975,30	15.094,61
6	Konstruksi	2.116.697,70	2.168.447,77	2.225.632,40	2.248.188,90	2.341.477,00
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.576.068,00	1.737.050,29	1.796.686,19	1.891.655,70	1.995.039,99
8	Transportasi dan Pergudangan	1.035.422,50	1.076.100,03	1.123.716,30	1.188.112,00	1.289.596,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	190.511,70	207.689,21	219.976,90	244.767,10	261.394,44
10	Informasi dan Komunikasi	220.635,00	249.920,85	270.654,44	287.943,80	312.214,92
11	Jasa Keuangan	136.625,40	141.343,41	151.173,43	161.293,60	167.989,14
12	Real Estate	280.460,20	297.288,72	301.354,54	318.881,50	330.884,56
13	Jasa Perusahaan	70.979,40	73.897,00	76.436,35	80.051,20	85.701,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.024.952,80	1.111.635,72	1.145.704,39	1.121.053,40	1.189.058,40
15	Jasa Pendidikan	772.571,70	926.064,47	1.021.754,96	1.119.270,20	1.279.165,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.915,50	118.368,98	134.649,51	152.251,20	166.291,75
17	Jasa Lainnya	130.169,40	140.503,24	173.508,24	198.304,40	220.866,84
Jumlah		97.024.451,80	93.492.172,43	94.921.969,38	117.816.985,40	123.531.562,42

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2018

^{a)} BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

^{b)} Angka Sangat Sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2019

C. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Produktivitas penduduk dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Besaran nilai PDRB Per Kapita dapat menjadi ukuran terhadap tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun angka tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai tolok ukur.

PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2014-2018 yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada tahun tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Kemudian tahun 2017 dan 2018 meningkat kembali. Data PDRB Per Kapita yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014–2018 (juta rupiah)

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas dan Batubara
2014	316,08	-	76,65
2015	292,06	290,72	77,31
2016	266,40	265,52	76,88
2017	344,38	343,31	90,80
2018 ^{a)}	349,75	348,68	94,23

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Keterangan : ^{a)} Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas bahwa PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara mengalami fluktuatif, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan. Nilai peningkatan PDRB selama dua tahun terakhir cukup signifikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita ADHB dengan migas sebesar Rp344,38 juta meningkat menjadi Rp349,75 juta.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator dari proses pembangunan adalah kualitas pembangunan manusia. Ukuran kualitas pembangunan manusia secara umum dinyatakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup.

Gambar 2.1
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (diolah)

Angka-angka yang tersaji dalam Gambar 2.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2014-2018, kinerja pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kutai Timur telah berjalan cukup baik. Setiap tahun IPM selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pada perkembangan dua (2) tahun terakhir yakni, pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Kutai Timur mencapai 71,91 dan diperkirakan di tahun 2018 menjadi 72,45 (Angka estimasi). Kenaikan angka IPM ini sangat dipengaruhi oleh naiknya variabel pembentuknya seperti variabel kesehatan dan pendidikan. Variabel kesehatan ditunjukkan dengan naiknya angka harapan hidup dari 72,45 tahun pada tahun 2017 menjadi 72,51 pada tahun

2018. Variabel pendidikan yang ditunjukkan dengan naiknya angka Harapan Lama Sekolah dari tahun 2017 sebesar 12,48 tahun menjadi diperkirakan pada tahun 2018 menjadi 12,52 tahun. Variabel kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Kutai Timur naik dari Rp10.273.000 pada tahun 2017 menjadi Rp10.558.000 pada tahun 2018.

F. Indeks Pembangunan Desa

Desa Membangun adalah program pembangunan yang difokuskan dan dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri. Kinerja pembangunan di suatu desa diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Berdasarkan nilai IPD, desa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Ukuran IPD dikembangkan dengan angka indeks komposit. Angka indeks ketiga kelompok desa berdasarkan ukuran IPD seperti tabel berikut.

Tabel 2.5
Kategori Desa Berdasarkan Skor dan IPD

Kategori Desa	Skor IPD	IPD
Desa Tertinggal	< 50	Indeks < 0,50
Desa Berkembang	50-74	Indeks 0,50 – 0,74
Desa Mandiri	>75	Indeks > 0,75

Sumber: Bappenas

Pada tahun 2015 IPD Kabupaten Kutai Timur sebesar 56,94 menjadi 57,74 pada tahun 2016 dan 60,70 pada tahun 2017. Peningkatan nilai IPD tersebut diikuti dengan pergeseran kategori desa yang semakin membaik, seperti pada Tabel 2.6. Penurunan jumlah desa tertinggal dari tahun 2015 ke tahun 2017 sebanyak 6 desa. Sebaliknya, peningkatan terjadi pada katagori desa berkembang dan desa mandiri. Desa berkembang meningkat sebanyak 13 desa dan desa mandiri meningkat sebanyak 4 desa. Jumlah desa di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan sebanyak 6 desa dari tahun 2015 ke tahun 2017.

Tabel 2.6
Kategori Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dan 2017

Kategori Desa	Jumlah Desa	
	2015	2017
Desa Tertinggal	23	12
Desa Berkembang	106	119
Desa Mandiri	4	8
Jumlah Desa	133	139

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Terdapat 5 (lima) variabel atau dimensi utama yang diukur dalam IPD, yaitu:

1. Pelayanan Dasar. Dimensi ini mewakili aspek pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Variabel penyusun Pelayanan Dasar adalah: 1) Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan; 2) Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan mencakup: rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes dan apotek.
2. Kondisi Infrastruktur, mewakili aspek Kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara berkelanjutan. Variabel penyusun kondisi infrastruktur adalah: 1) Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, warung/kedai makanan, akomodasi hotel/penginapan, serta bank; 2) Ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; 3) Ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; 4) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
3. Aksesibilitas dan sarana Transportasi. Hal ini mencakup kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi antar desa. Variabel penyusun aksesibilitas/transportasi adalah: 1)

Ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan; 2) Ketersediaan dan operasional angkutan umum dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati.

4. **Pelayanan Umum.** Hal ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan dan sebagainya. Variabel penyusun pelayanan umum adalah: 1) penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada beberapa jenis penyakit, diantaranya wabah diare, dan penanganan gizi buruk; 2) ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.
5. **Penyelenggaraan Pemerintahan.** Hal ini menggambarkan kinerja pemerintahan desa dalam bentuk pelayanan administratif. Variabel-variabel penyusun penyelenggaraan pemerintahan adalah: 1) Kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan desa; 2) Kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

2.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat mencakup indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

Kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2018 disajikan dalam Tabel 2.7. Dari lima indikator capaian kinerja urusan pendidikan, tiga diantaranya selalu mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dua indikator capaian yang mengalami fluktuasi adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.

Tabel 2.7
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	2016	2017	2018
Rata-rata lama sekolah	(%)	8,69	8,72	9,06
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	(%)	114,65	125,28	126,29
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	(%)	95,62	99,20	98,90
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	(%)	101,06	109,58	111,18
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	(%)	75,61	72,11	74,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar yang ditetapkan oleh UNDP adalah rata-rata lama sekolah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.8
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
2016	8,69
2017	8,72
2018	9,06

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kutai Timur menunjukkan

trend peningkatan selama tahun 2016-2018. Apabila angka-angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menjalani pendidikan setara kelas 3 SMP. Kondisi ini berarti sudah melampaui angka 6 tahun (lulus SD) dan meningkat satu tahun dari tahun 2017.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Angka APK yang lebih tinggi bermakna semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Gambar 2.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.2, APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 sebesar 114,65 persen meningkat menjadi 126,29 persen pada tahun

2018. Di sisi yang lain, APK SMP/MTs tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 98,90 persen pada tahun 2018 dari yang sebelumnya sebesar 99,2 persen pada tahun 2017. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Gambar 2.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Gambar 2.3 menunjukkan tren APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten

Kutai Timur dari tahun 2016 sampai 2018. Pada periode tersebut tren APM SD/MI mengalami peningkatan sedangkan APM SMP/MTs mengalami fluktuasi. Tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan angka APM pada jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs. APM SD naik sebesar 1,60 persen dan APM SMP/MTs naik sebesar 2,15 persen.

B. Kesehatan

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKBH dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun, per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

AKHB merupakan salah satu indikator dari status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKBH dipengaruhi oleh indikator-indikator: tingkat morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan Ibu. Secara empiris, AKBH di suatu daerah berkaitan dengan angka pendapatan daerah per kapita. Namun, di level rumah tangga; AKBH sangat berkaitan dengan: pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Jadi, AKBH memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 2.9
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) (per 1000 KH)	985,17	987,78	988,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Tabel 2.9 menyajikan AKHB di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2015-2017. AKHB di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2015-2017 relatif sangat baik; yaitu pada kisaran 985-988 bayi per 1000 kelahiran.

2) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program kesehatan. AHH juga sebagai indikator penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya difokuskan untuk meningkatkan AHH yaitu rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal.

Tabel 2.10
Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Variabel	Satuan	2016	2017	2018
Angka Kelahiran Total /TFR	Per Wanita	2,13	2,33	-
Angka Kematian Bayi/IMR	Per 1000 kelahiran hidup	12,20	11,55	9,00
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,41	72,45	72,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.10 menyajikan indikator kesehatan yang mencakup: *Total Fertility Rate* (TFR), *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Angka Harapan Hidup (AHH) selama tahun 2016-2018 di Kabupaten Kutai Timur. Dua indikator yang terakhir, yaitu IMR dan AHH menunjukkan kondisi yang menggembirakan, dimana IMR mengalami penurunan yang cukup signifikan; IMR turun hampir 100 persen pada tahun 2018 dibanding kondisi tahun 2016. Di sisi yang lain, AHH meningkat sebesar 0,06 tahun pada tahun 2018 dibanding kondisi tahun 2017. Prestasi penurunan IMR dan peningkatan AHH ini diikuti oleh peningkatan kelahiran (TFR) hampir mencapai 2,33 bayi per wanita

usia subur pada tahun 2017 dibanding TFR tahun 2016.

C. Pertanahan

Analisis kesesuaian lahan dikaitkan dengan aspek-aspek lain seperti: tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan terkait, serta kondisi dan kecenderungan yang ada. Pola pemanfaatan ruang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang tersebut, perlu dilakukan penatagunaan tanah dalam rangka menjamin penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai arahan fungsi kawasan.

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah memiliki konsekuensi bagi pembangunan yaitu bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap per sektor disajikan dalam Tabel 2.11. Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor pertanian menempati posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain sebanyak lebih dari 30 persen. Dalam tiga tahun terakhir jumlah tenaga kerja yang terserap selalu mengalami peningkatan, namun jika ditinjau dari persentase serapan tenaga kerja, sektor pertanian mengalami fluktuasi.

Tabel 2.11
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016-2018

Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	52.814	35,69	52.820	35,36	67.747	43,76
Pertambangan	16.734	7,24	17.234	11,54	14.882	9,62
Industri Pengolahan	-	-	-	-	4.634	3,00
Listrik, Gas dan Air Bersih	10.653	4,61	10.743	7,19	759	0,49
Bangunan	1.741	0,75	1.758	1,18	6.504	4,20
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.332	4,47	10.332	6,92	5.324	3,44
Pengangkutan dan	2.995	1,30	3.065	2,05	1.630	1,05

Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Komunikasi						
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	633	0,27	654	0,44	6.170	3,99
Jasa-jasa	52.059	22,51	-	-	1.692	1,09
Bidang Lainnya	-	-	52.759	35,32	45.372	29,33
Total	147.961	100,00	149.365	100,00	154.714	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur Tahun 2019
 Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

2.1.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah. Upaya pelestarian budaya penting untuk dilakukan mengingat semakin derasnya arus Informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kutai Timur terus diupayakan agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai budaya. Upaya peningkatan jati diri masyarakat Kutai Timur dalam hal solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu untuk terus ditingkatkan.

2.1.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, *skill*, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan, baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Tabel 2.12
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	102,62	117,15	118,68
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP	%	115,39	81,06	82,55
Angka putus sekolah SD	%	0,10	0,07	0,10
Angka putus sekolah SLTP	%	0,42	0,13	0,82
Angka Kelulusan (AL) SD	%	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SLTP	%	100	100	100
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	99,32	76,04	81,60
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,80	90,93	93,20
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SD)		87,85	57,10	57,34
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SMP)		90,14	53,42	52,91
Rasio guru/murid (SD)		16,93	17,98	17,99
Rasio guru murid (SMP)		13,43	16,99	15,28
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,90	92,17	84,11
Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	97,94	94,20	na

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Gambar 2.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Data yang tersaji dalam Gambar 2.4 membandingkan APS SD dan APS SMP/MTs selama tahun 2016-2018. Secara umum tingkat APS SD mengalami peningkatan dari 102,62 persen pada tahun 2016, menjadi 118,69 persen pada tahun 2018. Namun, di sisi yang lain, tingkat APS SMP/MTs cenderung mengalami fluktuasi antara 81-115 persen pada periode yang sama.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/SLTP)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan sebagai jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.13
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Tahun		
	2016	2017	2018
SD	60,42	57,10	57,34
SMP	63,59	53,42	52,91

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.13 menyajikan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di tingkat SD dan SMP. Untuk kedua jenjang pendidikan, SD dan SMP, rasio ketersediaan sekolah relatif mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir.

3) Rasio Guru Terhadap Murid (SD/SLTP)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid pada tingkat pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, dan sekaligus mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid selama tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Rasio Guru Terhadap Murid	Tahun		
	2016	2017	2018
SD	16,93	17,98	17,99
SMP	13,43	16,99	15,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid ditingkat SD dan SMP selama 2016-2018. Pada tingkat SD, rasio guru selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Pada tingkat SMP di tahun 2018, rasio guru terhadap murid menurun dari satu guru melayani 17 murid menjadi satu guru melayani 15 murid. Semakin rendah nilai rasio ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran bisa meningkat dari tahun sebelumnya.

4) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

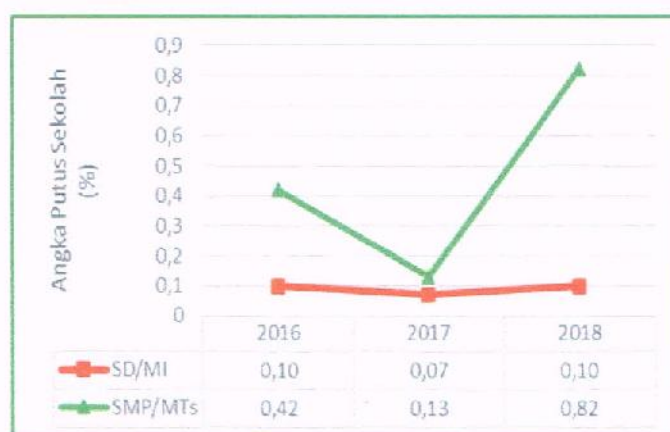
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Rentangian anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas Nomor 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini meliputi: a) *Infant* (0-1 tahun); b) *Toddler* (2-3 tahun); c) *Preschool/ Kindergarten children* (3-6 tahun); dan d) *Early Primary School* (SD Kelas Awal) (6-8 tahun).

5) Angka Putus Sekolah (SD/SLTP)

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

Gambar 2.5
Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Gambar 2.5 menyajikan Angka Putus Sekolah (APTS) tingkat SD dan SMP selama kurun waktu 2016-2018. APTS pendidikan setingkat SD dan SMP secara umum mengalami fluktuasi. Di tahun 2017, keduanya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di tingkat SD dan SMP di tahun tersebut telah mengalami perbaikan. Namun di tahun 2018, APTS SD dan SMP sama-sama mengalami peningkatan. Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar melalui peningkatan kesiapan anak bersekolah (*school readiness*).

Beberapa studi empiris melaporkan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi cenderung memiliki angka putus sekolah yang lebih rendah pada tingkat sekolah dasar. Keikutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia dini (*Early Childhood Education and Development-ECED*) telah meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial mulai terbina dengan baik. Angka putus sekolah diduga berkaitan dengan kondisi geografis tempat tinggal yang jauh dari lokasi sekolah. Penyebab lainnya, faktor ekonomi dan rendahnya partisipasi orang tua.

6) Angka Kelulusan (SD/SLTP)

Tabel 2.15
Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018 (%)

AL	Tahun		
	2016	2017	2018
SD	100,00	100,00	100,00
SMP	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan. Tabel 2.15

menyajikan Angka Kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SLTP selama tahun 2016-2018. Angka Kelulusan pada jenjang SD dan SMP sudah mencapai 100 persen.

7) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang SD/MI/Paket A/setara SD terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP.

Tabel 2.16
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2018 (%)

Angka Melanjutkan Sekolah	Tahun		
	2016	2017	2018
SD/MI ke SMP/MTs	98,90	92,17	84,11
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	97,94	94,20	0,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.16 menunjukkan capaian indikator Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2016 hingga 2018. Untuk kedua jenjang pendidikan ini (SD dan SMP), angka AMS menunjukkan adanya *trend* penurunan.

8) Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ditetapkan bahwa: "Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional". **Kualifikasi Akademik** merupakan pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Pendidikan minimal ini dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap guru wajib memenuhi **standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru** yang berlaku secara nasional. Guru merupakan salah satu pendidik yang memegang peran esensial

dalam sistem pendidikan.

Capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV sebesar 89,79 persen menjadi 93,20 persen pada tahun 2018. Peningkatan ini dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan dan sistem sertifikasi guru. Hal tersebut yang membuat seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan serta sarana prasarana yang memadai.

Tabel 2.17
 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan
 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,45	0,51	0,46
Rasio rumah sakit per satuan penduduk		0,02	0,02	0,03
Rasio dokter per 100.000 penduduk		0,30	0,36	0,32
Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,50	0,59	0,49
Rasio Posyandu per satuan balita		7,49	8,7	8,1
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
Cakupan puskesmas	%	116,67	116,67	116,67
Cakupan puskesmas pembantu	%	79,26	75	na
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	na	na	na
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	78,00	61,06	63,17
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	85,50	83,19	85,77
Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	88,15	80,14	81,56

Indikator	Satuan	2016	Tahun 2017	2018
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	88,15	43,47	63,37
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100
Cakupan kunjungan bayi	%	95,04	91,44	88,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Indikator derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara umum relatif cukup baik. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya: lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor genetik dan perilaku hidup sehat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena pelayanan kesehatan lebih terkait dengan upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, dan edukatif. Pada sisi yang lain, permasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum mencakup: (1) dana kesehatan yang terbatas, (2) terbatasnya dan rendahnya profesionalisme tenaga medis dan paramedis, (3) rendahnya mutu layanan medis, (4) sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, (5) belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang layak, dan (6) wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya.

1) Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.18
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Puskesmas	21	21	21
2	Jumlah Poliklinik	33	61	63
3	Jumlah Pustu	107	108	108
4	Jumlah nomor 1 sampai dengan 3	161	190	192
5	Jumlah Penduduk	413.553	418.625	420.760

Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Dokter Umum	108	130	166
2	Jumlah Dokter Gigi	33	38	50
3	Jumlah Dokter Spesialis	37	38	38
4	Bidan	427	561	670
5	Perawat	762	794	747
6	Tenaga Farmasi	76	113	112
7	Tenaga Sanitarian	14	27	41
8	Kesehatan Masyarakat	68	88	125
9	Tenaga Gizi	18	22	27
10	Tenaga Terapi Fisik	6	6	8
11	Tenaga Keteknisan Medis	72	156	165
12	Jumlah Penduduk	415.553	418.625	420.670
13	Rasio dokter terhadap penduduk	1:3.848	1:3.320	1:2.534
14	Rasio dokter gigi terhadap penduduk	1:12.593	1:11.016	1:8.413
15	Rasio dokter spesialis terhadap penduduk	1:11.231	1:11.016	1:11.070
16	Rasio tenaga gizi terhadap penduduk	1: 23.086	1:19.028	1:15.580
17	Rasio tenaga bidan terhadap penduduk	1:973	1:746	1:628
18	Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap penduduk	1:6.111	1:4.757	1:3.365
19	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,47	4,20	4,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Indikator kesehatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas fisik kesehatan, namun juga ketersediaan tenaga medis kesehatan. Tabel 2.27 menyajikan rasio dokter dan rasio tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Kutai Timur. Angka yang tersaji dalam tabel tersebut mengindikasikan jumlah dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis mengalami fluktuasi, namun ada trend peningkatan pada tahun 2018. Di sisi yang lain, tenaga bidan, perawat, tenaga farmasi dan tenaga ahli gizi mulai mengalami peningkatan selama tahun 2016-2018.

3) Rasio dokter per satuan penduduk

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Manusia yang sehat dan produktif akan meningkatkan daya saing suatu bangsa. Ketersediaan tenaga kesehatan

khususnya, dokter di Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 dan 2018 masih belum ideal berdasarkan rasio ideal perbandingan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar Indonesia sehat dan WHO (1 dokter untuk 2500 jiwa). Namun, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi penurunan rasio jumlah dokter terhadap penduduk dari 1 dokter : 3.281 jiwa menjadi 1 dokter : 3.320 jiwa.

4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk (1.000 penduduk). Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Di Kabupaten Kutai Timur, rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan dari 3,47 tahun 2016 menjadi 4,50 pada tahun 2018.

5) Rasio posyandu per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bersumber dari dukungan masyarakat. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat. Posyandu memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Tabel 2.21
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu	308	310	na
2	Jumlah Balita	na	20.171	na
3	Rasio	7,50	10,41	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2015 sebesar 7,02; kemudian naik menjadi menjadi 7,50 pada tahun 2016 dan sebesar 10,41 pada tahun 2017. Upaya awal yang dilakukan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka untuk *update* perkembangan rasio posyandu adalah

melakukan pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita. Sehingga dapat diketahui apakah jumlah posyandunya memang kurang atau jumlah balita yang terus meningkat.

6) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari kondisi terjadinya kekurangan gizi menahun. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang mendapat penanganan di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan selama tahun 2016-2018 sudah mencapai 100 persen.

7) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan komplikasi kebidanan sebaiknya mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100 persen. Hal ini berarti setiap ibu yang mengalami komplikasi kebidanan mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2016, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani telah mencapai 82,97 persen, kemudian turun menjadi 63,17 persen tahun 2018. Kecenderungan penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera mendapatkan perhatian yang serius untuk menemukan penyebabnya.

8) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 mencapai sebesar 85,50 persen; namun kemudian meningkat menjadi 85,70 persen pada tahun 2018.

9) Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada jumlah bayi. Pemerintah daerah selalu berupaya menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa/kelurahan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila diperoleh >80 persen bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap dalam satu tahun. Capaian cakupan desa/Kelurahan UCI mencapai 88,15 persen pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 81,56 persen pada tahun 2018. Kondisi yang perlu diperhatikan adalah apakah semua bayi yang berkunjung ke pelayanan kesehatan termasuk posyandu dan pustu mendapatkan pelayanan imunisasi. Artinya, pada saat kunjungan bayi, apakah kader atau tenaga kesehatan sudah memberikan informasi tentang manfaat dan jadwal imunisasi yang lengkap.

10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA

Upaya dalam menanggulangi TBC baru di Kabupaten Kutai Timur, dapat dilihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar 88,15 persen, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 88 persen. Menurut hasil penelitian Pasaribu (2005), dilaporkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya CDR (*Case Detection Rate*) pada program TBC adalah: kondisi kemiskinan, kurangnya penyuluhan kesehatan, dan perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Pengetahuan dan informasi yang dimiliki

masyarakat dapat mengidentifikasi gejala TB pada dirinya sendiri dan orang yang berada di sekitarnya, untuk kemudian menyarankan agar memeriksakan ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Untuk dapat meningkatkan CDR, perlu dilakukan pemantapan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) pada praktisi kesehatan, terutama dokter praktek swasta dan tenaga kesehatan lainnya. Strategi ini terdiri atas lima komponen utama yakni: (i) adanya komitmen politik, tersedianya pelayanan pemeriksaan mikroskopik (*passive case finding using sputum-smear microscopy*), (ii) terjaminnya penyediaan obat yang merata dan tepat waktu, (iii) adanya sistem monitoring yang baik, dan (iv) adanya program pengawasan keteraturan minum obat, dan (v) disertai jaminan agar setiap pasien pasti minum obat sampai tuntas (Mahendradhata, 2009).

11) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari *genus Flavivirus, famili Flaviviridae*. Setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe (*hiperendemisitas*) dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Capaian penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kutai Timur sebesar 100 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018.

12) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar layanan dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami penurunan dari 2016 sebesar 95,04 persen menjadi 88,17 persen pada tahun 2018.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator capaian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup kondisi jalan raya, rasio tempat ibadah, rasio tempat pemakaman, rasio tempat pembuangan sampah dan beberapa indikator lainnya.

Tabel 2.22

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	51,63	59,50	45,41
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0,670	0,209	0,0084
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		1,21	1,51	na
Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk perkotaan		0,17	0,51	na
Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		2,74	1,99	na
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa	%	85	56	2,73
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kecamatan	%	na	5	27,77
Panjang Jalan	km	1.394	1.106	1.105,76
1. Jembatan	Unit	47	47	47
2. Panjang Jembatan	Meter	3.148	3.148	3.148
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,00	54,96	38,58
Batas wilayah antar kabupaten/kota	%	54,31	72,4	72,4
Batas wilayah antar kecamatan	%	12,12	24,24	30,3
Batas wilayah antar desa	%	38,8	49,73	71,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Capaian indikator dalam urusan pekerjaan umum disajikan di bawah ini:

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Di samping akses transportasi yang relatif terbatas, pola sebaran penduduk yang tidak merata dapat memicu kesenjangan dalam proses pembangunan dan menciptakan disparitas regional. Pembangunan transportasi sangat berperan sebagai langkah awal dalam upaya pemerataan pembangunan di semua sektor.

Kondisi permukaan jalan di Kabupaten Kutai Timur dibedakan menjadi permukaan jalan mantap dan tidak mantap. Kondisi jalan mantap dibedakan menjadi kondisi baik dan sedang. Kondisi jalan mantap baik sepanjang 200,70 km (18,15 persen), sedangkan kondisi jalan mantap sedang sepanjang 53,63 km (4,85 persen). Selanjutnya kondisi jalan tidak mantap juga dibedakan menjadi rusak ringan dan rusak berat. Jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 553 km (50,01 persen) dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 298,34 km (26,98 persen). Jenis permukaan jalan juga dibedakan menjadi permukaan aspal, beton, kerikil dan tanah. Tahun 2018 Kabupaten Kutai Timur memiliki jalan beraspal sepanjang 231,44 km (20,93 persen), beton sepanjang 97,20 km (8,79 persen), kerikil sepanjang 478,46 km (43,27 persen), dan masih berupa permukaan tanah sepanjang 298,67 km (27,01 persen).

2) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah dinyatakan dalam jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Beribadah sangat berguna untuk membentuk kualitas manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan tempat sarana ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Tabel 2.23

Sarana Peribadatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017

Sarana Peribadatan	Tahun		
	2015	2016	2017
Masjid/Musholla/Langgar	849	825	800
Gereja Kristen Protestan	160	163	166
Gereja Kristen Katolik	54	54	54
Pura	15	16	23
Vihara	1	1	0
Jumlah	1.079	1.059	1.043

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Keterangan*) Data KUA Kecamatan yang dihimpun di Kementerian Agama Kab. Kutai Timur
 Untuk Vihara sudah terbangun 1 vihara tetapi belum diresmikan.

3) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur telah memadai. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memiliki TPU yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengantisipasi kebutuhan terhadap TPU yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perlu didorong partisipasi swasta dalam menyediakan lahan pemakaman. Capaian rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2016 sebesar 1,21 kemudian turun menjadi 1,51 pada tahun 2017. Namun tahun 2018 masih belum tersedia data.

4) Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2017 capaian turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sebesar 1,99 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,74 persen. Sementara itu, tahun 2018 belum tersedia data.

5) Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Sektor pertanian menjadi tumpuan Kabupaten Kutai Timur untuk menuju kemandirian pangan. Oleh karena itu pembangunan irigasi sebagai

pendukung utama sektor pertanian harus menjadi prioritas, terutama di wilayah yang memiliki potensi cetak sawah baru. Kabupaten Kutai Timur memiliki Daerah Irigasi (DI) sebanyak 3 (tiga) unit. DI 1 terletak di daerah Pesap (Kecamatan Kongbeng). DI ini sudah mampu mengairi sawah seluas 365 ha dari target area persawahan seluas 430 ha (84,88 persen). DI yang kedua terletak di Kecamatan Kaubun. DI ini sudah mampu mengairi 1.400 ha dari target luas sawah 2.030 ha (68,97 persen). Selanjutnya, DI yang ketiga adalah DI Tanah Abang (Kecamatan Long Mesangat). DI ini sudah mampu mengairi 100 persen target sawah yang ada di wilayah target, yaitu seluas 215 ha.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.24
 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan Rakyat
 dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur
 Tahun 2017-2018

Indikator	Satuan	Tahun	
		2017	2018
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,70	90,70
Rasio rumah layak huni		0,20	0,30

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kutai Timur Tahun 2019

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pada kurun waktu dua tahun terakhir persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 90,70 persen.

2) Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2017 Kabupaten Kutai Timur tidak melaksanakan program pembangunan rumah layak huni seperti tahun anggaran sebelumnya, namun program yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni yang sudah ada. Jumlah unit rumah yang menjadi sasaran program sebesar 280 rumah dengan rasio sebesar 0,20. Sementara itu, pada tahun 2018 rasio meningkat menjadi 0,30. Lokasi pelaksanaan program tersebut berada pada enam desa yang tersebar dalam tiga kecamatan, yaitu Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Kaliorang. Program tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang didukung oleh pihak swasta untuk mensukseskan program tersebut, dimana salah satu program tersebut diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB di Kabupaten Kutai Timur jumlahnya semakin meningkat. Setiap tahun, rata-rata ada tiga kegiatan keagamaan baru yang diadakan oleh Lembaga Keagamaan/ FKUB. Namun LSM, Ormas dan OKP yang masih aktif mengalami penurunan tiap tahunnya seperti tampak pada Gambar 2.25 di bawah.

Tabel 2.25
 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,
 dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur
 Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
LSM, Ormas dan OKP yang aktif	Orang	450	345	178
Persentase pengurus dan anggota keagamaan yang dibina	%	75	80	85
Jumlah kegiatan Lembaga Keagamaan/ Forum Komunikasi Umat Beragama	Keg	12	15	18

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

F. Sosial

Perlindungan sosial tidak hanya sebatas pemenuhan hak, tetapi juga

sebagai syarat terlaksananya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan yang setara dan berkelanjutan.

Tabel 2.26
 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial
 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018
1.	Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	%	54,43	34,49	78,88

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel 2.26 menyajikan bahwa rasio PMKS tertangani di Kabupaten Kutai Timur menurun selama tahun 2016-2017. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani menjadi sebesar 78,88 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang capaiannya cukup rendah sebesar 34,49 persen. Tahun 2019 diharapkan penanganan PMKS dapat ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.

2.1.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

Tabel 2.27
 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan
 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,56	69,09	58,54
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,06	1,01	1,12
Angkatan Kerja	Jiwa	215.586	215.586	117.202
Pencari kerja yang ditempatkan	%	957	1.531	1.346
Angka pengangguran	Jiwa	2.295	2.192	1.992

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu

dalam periode survei. Pada tahun 2016 TPAK Kabupaten Kutai Timur sebesar 70,56 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 69,09 persen pada tahun 2017 dan terus menurun menjadi 58,54 persen pada tahun 2018. TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah), demikian juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki dan perempuan hanya bertugas untuk mengurus rumah. Hal ini mengakibatkan perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja semakin sedikit.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang akan ditimbulkan, contohnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, indikator TPT digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Persentase TPT Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 sebesar 1,06 persen, kemudian turun sedikit pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,01 persen dan naik menjadi 1,12 persen di tahun 2018.

3) Jumlah Pengangguran

Pengangguran adalah salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara umum. Apabila tingkat pengangguran tinggi maka dapat menurunkan tingkat produktivitas dan berujung pada akhirnya menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. Berdasarkan capaian dalam tiga tahun terakhir, terdapat tren penurunan jumlah pengangguran, dimana pada tahun 2016 sebesar 2.295 jiwa menjadi

sebesar 2.192 jiwa pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 1.992 jiwa. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dalam menekan jumlah angka pengangguran.

4) Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Timur telah berhasil melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang diindikasikan dari penyelesaian penanganan perkara tersebut. Hal ini menunjukkan Kabupaten Kutai Timur adalah kabupaten yang berkomitmen dalam mengembangkan kabupaten yang ramah anak dan wanita.

Tabel 2.28
 Capaian Aspek Pelayanan Umum
 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	(%)	100	100	92

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab. Kutai Timur Tahun 2019

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten. Ketersediaan pangan utama di wilayah Kutai Timur masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan sebesar 7,73 persen setelah sebelumnya mengalami penurunan yang besar sebanyak 30,84 persen. Hal ini memberi indikasi Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur sebaiknya lebih fokus pada pelayanan umum urusan pangan, agar indikator ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur semakin baik dan potensi atau kondisi rawan pangan dapat diturunkan.

Tabel 2.29
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Regulasi ketahanan pangan	Ada/ Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
Ketersediaan pangan utama	%	83,10	52,26	59,99

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

2) Regulasi Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2012, memiliki regulasi yang mengatur tentang Ketahanan pangan, diantaranya diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pada Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran organisasi dalam mencapai sasaran strategis serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Tabel 2.30 adalah gambaran secara lengkap mengenai ada dan tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2016-2018.

Tabel 2.30
Regulasi Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda ;			
	- Ada	√	√	√
	- Tidak Ada			
2	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada ;			
	- Ada	√	√	√
	- Tidak Ada			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

D. Lingkungan Hidup

Pelayanan umum Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2016-2018 mencakup persentase penegakan hukum lingkungan, penetapan kelas air, upaya penurunan gas emisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca. Secara umum indikator capaian pelayanan umum lingkungan hidup semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penegakan hukum lingkungan dan penurunan emisi total yang meningkat di tahun 2016-2018.

Tabel 2.31
 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Penegakan hukum lingkungan	%	50	57,14	75
Penetapan kelas air	sungai	1	2	0
Penurunan emisi total (dalam juta)	CO2-Eq/th	139	0,884	0,12
Pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca	%	100	100	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

E. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil mencakup jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik dan kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk. Tabel 2.32 menyajikan indikator capaian bidang kependudukan selama tahun 2016-2018 yang sudah semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kepemilikan KTP elektronik dan akte kelahiran yang meningkat di tahun 2018.

Tabel 2.32
 Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Kepemilikan KTP elektronik	orang	201.530	230.285	278.191
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	orang	158.377	140.881	197.260

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur Tahun 2019

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah. Tabel 2.33 menunjukkan adanya kegiatan yang bersifat rutin terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa di tahun 2016-2018.

Tabel 2.33
Capaian Aspek Pelayanan Umum
Urusan Pemberdayan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	keg	6	6	6

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian cakupan Peserta KB Aktif mengalami fluktuasi. Tahun 2016 cakupan peserta KB aktif mencapai 120,10 persen. Hal ini dimungkinkan karena peserta KB aktif yang bermigrasi ke Kabupaten Kutai Timur. Kemudian tahun 2017 cakupan ini mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar 71,32 persen. Cakupan tersebut menurun di tahun 2017, karena cakupannya yang tidak terlayani oleh OPD pelaksana, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Pada tahun 2018, cakupan peserta KB aktif meningkat menjadi 61 persen.

Tabel 2.34
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Cakupan peserta KB aktif	%	120,10	48,78	61
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	67,03	28,44	15,10

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kutai Timur Tahun 2019

H. Perhubungan

1) Jumlah Terminal/ Pelabuhan Laut/ Pelabuhan Udara

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak mengalami pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat mobilitasnya semakin tinggi dengan lonjakan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menargetkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut dan udara guna mengantisipasi perkembangan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahunnya. Data BPS menampilkan bahwa belum banyak peningkatan jumlah terminal/pelabuhan laut/pelabuhan udara dalam 3 tahun terakhir ini. Hanya ada penambahan satu pelabuhan laut di tahun 2016.

2) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi.

Tabel 2.35
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Terminal dan subterminal	Unit	12	12	na

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Pelabuhan Laut	Unit	3	3	na
Persentase rambu-rambu yang terpasang	%	97	100	na
Jumlah terminal penumpang dan barang yang dikelola	Unit	5	12	na

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Timur Tahun 2019

I. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat potensial, terutama dalam pengumpulan data maupun diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan. Bidang layanan ini juga mencakup hasil pembangunan berbasis data mutakhir kepada masyarakat luas. Tabel 2.36 menyajikan rasio ketersediaan jaringan komunikasi per kecamatan. Ada peningkatan capaian yang cukup tinggi dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun pada tahun 2017, rasio ini mengalami penurunan yang tajam. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebaiknya lebih fokus untuk menaikkan rasio ini agar pembangunan bidang komunikasi dapat berjalan dengan baik.

Tabel 2.36
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Rasio ketersediaan jaringan komunikasi per kecamatan	%	50	0,024	27,18

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Kab. Kutai Timur Tahun 2019

J. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Persentase koperasi aktif	%	90,02	59,68	55,21
Jumlah UKM	Unit	5.587	7.618	8.248

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan angka kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan, menurunnya angka kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Koperasi yang mampu menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) menunjukkan keaktifan riil dalam menjalankan koperasi sesuai asas koperasi. Jumlah persentase koperasi aktif yang cenderung mengalami penurunan dari 90,02 persen pada tahun 2016 menjadi 55,21 persen pada tahun 2018.

2) Jumlah UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pada tahun 2016-2018 jumlah UMKM relatif semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Koperasi telah berhasil membina UMKM agar tercipta lapangan usaha bagi masyarakat dan upaya penurunan pengangguran lebih cepat direalisasikan.

K. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.38
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	10	11	179
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (M)	4.600	8.610	4.587

Indikator	Satuan	2016	Tahun 2017	2018
Indeks kepuasan masyarakat (perizinan)	Indeks	73,12	77,49	7,87

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Kutai Timur mendapatkan tambahan jumlah investor berskala nasional dalam bentuk proyek. Hingga 2018, total sudah masuk 179 proyek berskala nasional yang masuk ke Kabupaten Kutai Timur. Jumlah tersebut meningkat tajam dari tahun 2017 yang hanya terdapat 11 proyek.

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dapat mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Semakin banyak realisasi proyek maka menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Tabel 2.38 menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir, terutama tahun 2017 terdapat kenaikan jumlah nilai investor (PMDN/PMA) yang menggembirakan, hingga mencapai Rp 8.610 M. Namun demikian pada tahun 2018 kenaikan jumlah investor tidak meningkatkan nilai investor yang justru mengalami penurunan menjadi Rp 4.587 M.

L. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakannya.

Tabel 2.39

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Jumlah organisasi pemuda	buah	38	38	na
Jumlah organisasi olahraga	buah	380	380	na
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kali	7	4	2
Jumlah Kegiatan olahraga	kali	23	12	4
Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	Unit	22	22	na
Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	169	180	37

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah lapangan olahraga yang dibangun, kegiatan olahraga dan kepemudaan. Perlu adanya perhatian untuk mengajak anak muda agar mau memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun, menciptakan kegiatan yang bertemakan kepemudaan dan olahraga. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah pergaulan anak-anak ke arah yang tidak baik, seperti Narkoba dan kenakalan remaja lainnya.

M. Kebudayaan

Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, semangat gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah, serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Selain itu, pengembangan seni budaya dapat diarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Tabel 2.40

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Keg	6	5	6
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	9	15
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	91,60	46	51

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

N. Perpustakaan

Perpustakaan milik Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan upaya mendorong masyarakat gemar membaca. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah koleksi buku-buku perpustakaan. Upaya tersebut perlu dikembangkan dengan meningkatkan jangkauannya mendekati khalayak sasaraannya agar tumbuh budaya literasi di kalangan masyarakat luas.

Tabel 2.41
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	judul	8.957	8.999	na

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

O. Kearsipan

Kearsipan, bank data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang memiliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu membutuhkan tenaga pengelola yang professional dalam mengatur tata laksana kearsipan daerah, sehingga peningkatan pengelolaan SDM pengelola Arsip dipandang sangat penting. Tercatat hingga tahun 2017, sebanyak 63,64 persen SKPD yang dapat mengelola arsip secara baku. Dibandingkan dengan

tahun 2016, terjadi kenaikan pengelolaan arsip secara baku oleh para SKPD yang cukup tinggi sebesar 49,36 persen.

Tabel 2.42
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	%	14,28	63,64	na

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

2.1.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

A. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah karena pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Sektor ini memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.43
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Kunjungan wisata	Orang	28.419	25.625	28.399

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pembangunan sektor pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kunjungan wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Pada tahun

2018, terjadi peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Kutai Timur sebesar 2.777 orang atau sebesar 5,13 persen. Perlu dilakukan upaya terus menerus dalam promosi wisata secara menyeluruh agar kegiatan wisata dan pengenalan potensi dan budaya Kutai Timur dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi wisata sangat besar dan kebudayaan daerah yang sangat tinggi

B. Pertanian

Sektor pertanian memegang peran penting di Kutai Timur, mengingat sektor tersebut menjadi bagian dari program pemerintah kabupaten yang mengedepankan pengembangan sektor agribisnis.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kw/ha/tahun	na	37,86	37,89
Cakupan Bina Kelompok Tani	%	na	23,43	28
Produksi Pangan Utama:				
a. Padi	Ton	27.787	32.916	34.150
b. Palawija	Ton	58.472	7.275	10.706
Populasi Sumber Pangan Hewani:				
a. Ternak Besar (sapi)	Ekor	na	17.376	18.856
b. Ternak Kecil (kambing)	Ekor	na	9.768	18.750
c. Unggas: Ayam ras pedaging (Dalam Ribuan)	Ekor	na	2.508	2.734
Produksi:				
a. Daging (sapi)	Ton	3.542,16	3.635	3.695
b. Telur	Kg	7.567,38	9.035	9.600
c. Susu	Liter	na	23,94	24,96
Konsumsi daging	Kg/kap/th	10,47	10,60	11,56
Luas areal sawah tadah hujan dan sawah beririgasi	Ha	na	5.498	8.716

Indikator	Satuan	2016	Tahun 2017	2018
Luas Perkebunan	Ha	470.744	470.413,81	473.317,93

Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama kebutuhan lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Pada beberapa komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas (nasional maupun ekspor) pada jangka menengah dan jangka panjang. Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kutai Timur mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Tabel 2.45
Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Luas Lahan	Satuan	2016	Tahun 2017	2018
1	Padi Sawah	Ha	7.261	8.716	8.716
2	Padi Ladang	Ha	5.427	4.451	4.792
3	Jagung	Ha	914	525	714
4	Ubi Kayu	Ha	459	390	523
5	Ubi Jalar	Ha	76	90	119
6	Kacang Tanah	Ha	108	113	142
7	Kedelai	Ha	43	10	8
8	Kacang Hijau	Ha	22	16	13
9	Sayuran	Ha	1.022	945	1.081

No	Luas Lahan	Satuan	2016	Tahun 2017	2018
10	Buah-buahan	Ha	4.937	5.020	5.194
Total		Ha	20.269	20.276	21.302

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2016-2018 memiliki total lahan pertanian yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 total luas lahan pertanian sebesar 20.269 Ha meningkat pada tahun 2017 menjadi 20.276 Ha dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 21.302 Ha. Jumlah luas lahan padi ladang mengalami peningkatan tertinggi diantara lahan pertanian lainnya sebanyak 341 Ha, yang terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016-2017 luas lahan padi ladang mengalami penurunan yang sangat banyak. Pada tahun 2018, luas padi sawah tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan walaupun jumlah luas lahannya terbanyak dibandingkan lahan pertanian lainnya. Dalam tiga tahun terakhir, luas lahan Kedelai dan Kacang Hijau selalu mengalami penurunan jumlah lahan.

Tabel 2.46
 Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	2016	Tahun 2017	2018
1	Padi sawah	Ton	14.934	21.770	21.925
2	Padi ladang	Ton	12.853	11.455	12.229
3	Jagung	Ton	1.352	1.131	1.524
4	Ubi kayu	Ton	5.667	5.460	7.240
5	Ubi jalar	Ton	821	1.262	1.645
6	Kacang tanah	Ton	96	133	167
7	Kedelai	Ton	65	11	9
8	Kacang hijau	Ton	29	17	13
9	Sayuran	Ton	1.225	945	1.151
10	Buah-buahan	Ton	49.228	60.555	62.065

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
	Total	Ton	86.270	102.739	107.968

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Hal yang sama terjadi total produksi pertanian yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, buah-buahan memiliki peningkatan produksi tertinggi sebanyak 11.327 Ton dari 49.228 Ton di tahun 2016 menjadi 60.555 Ton. Selanjutnya pada tahun 2018, peningkatan produksi tertinggi pada ubi kayu sebanyak 1.780 Ton dari 5.460 di tahun 2016 menjadi 7.240 Ton. Dalam tiga tahun terakhir, tidak hanya luas lahan saja yang berkurang, namun juga total produksi Kedelai dan Kacang Hijau selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil capaian bidang pertanian Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2018, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap berupaya mempertahankan bahkan terus meningkatkan luasan tanam dan produktivitas tanaman padi. Selain fokus pada tanaman padi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga perlu berkomitmen dalam upaya mencegah penurunan luasan dan produksi tanaman umbi-umbian, palawija maupun hortikultura dengan mencegah luasan lahan yang dialihfungsikan. Demi mewujudkan target Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian pangan, maka penting untuk melakukan upaya-upaya terobosan yang inovatif untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan tanaman palawija.

2) Produksi padi (Ton)

Hasil capaian produksi padi, terutama padi sawah di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten seiring dengan peningkatan luas lahan sawah. Namun demikian jika dibandingkan antara capaian dengan target RPJMD maka, kenaikan tersebut masih belum cukup untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Jika tidak dilakukan terobosan program yang

inovatif dan efektif untuk meningkatkan produksi padi, maka pada target akhir tahun 2019 akan sulit terealisasi.

3) Luas Perkebunan

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDRB adalah pada subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri, karena tingginya kebutuhan domestik. Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa dan karet.

Tabel 2.47
Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	Tahun 2017	2018
Luas Lahan Perkebunan (Ha):				
1	Karet	13.770,24	13.545,49	13.291,58
2	Kelapa	1.385,50	1.352,85	1.296,10
3	Kopi	121,35	121,35	98,85
4	Lada	422,18	407,18	418,75
5	Vanili	7,18	6,68	6,68
6	Kakao	4.082,76	4.009,51	3.415,43
7	Kelapa Sawit	450.635,31	453.556,18	453.490,69
8	A r e n	286,17	286,17	318,07
9	Kemiri	33,52	32,52	38,55
Jumlah		470.744,21	473.317,93	472.374,70
Produksi perkebunan (Ton):				
1	Karet	866,70	970,73	907,21
2	Kelapa	977,15	1.094,40	695,75
3	Kopi	43,54	48,74	45,56
4	Lada	113,70	127,34	119,01
5	Vanili	0,61	0,66	0,62
6	Kakao	1.311,44	1.468,36	1.372,30
7	Kelapa Sawit	6.179.635,52	5.874.980,93	5.275.877,28
8	A r e n	242,59	32,60	30,47
9	Kemiri	4,43	4,92	4,60
Jumlah		6.183.195,68	5.878.728,68	5.279.052,80

No	Uraian	2016	Tahun 2017	2018
Produktivitas (Kg/Ha)				
Produksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:				
1	Karet	1.145,97	1.150,42	951,45
2	Kelapa	983,86	1.099,96	699,28
3	Kopi Robusta	528,06	591,18	552,59
4	Lada	658,45	774,50	719,44
5	Vanili	187,52	240,29	224,30
6	Kakao	544,75	611,01	571,03
7	Kelapa Sawit	19.377,08	18.595,23	16.916,53
8	Aren	2.544,18	341,93	319,55
9	Kemiri	190,31	220,63	159,77
Jumlah		26.160,18	23.625,15	21.113,94

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Sub sektor perkebunan menunjukkan peningkatan dalam luas lahan perkebunan. Luas lahan bertambah dari 470.744,21 tahun 2016 menjadi 473.317,93. Peningkatan terjadi sebanyak 1.630,49 Ha. Namun hal tersebut tidak terjadi pada produksi dan produktivitas perkebunan. Keduanya mengalami penurunan. Total Produksi perkebunan di tahun 2016 mencapai 6.183.195,68 Ton menurun menjadi 5.279.052,80 Ton di tahun 2018. Selanjutnya produktivitas di tahun 2016 sebesar 26.160,18 Kg/Ha menurun menjadi 21.113,94 Kg/Ha di tahun 2018.

Sub sektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang baik dalam luas lahan tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya total lahan, total produksi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2016-2018. Bila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa peningkatan ini tidak terjadi pada seluruh komoditi perkebunan. Secara parsial terlihat adanya penurunan pada beberapa komoditi perkebunan, namun secara kumulatif menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan minat petani dan peningkatan investasi pada komoditas tertentu yang menjadi favorit dan lebih menguntungkan.

Luas lahan tanam perkebunan dari tahun 2016-2018 bertambah seluas 182.016,45 Ha dengan peningkatan produksi 4.105.622,9 Ton. Peningkatan produksi ini sangat ditunjang oleh peningkatan produksi perkebunan karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas perkebunan ini pun pada gilirannya juga merupakan yang terbesar dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di sub sektor perkebunan. Daya serap tenaga kerja pada tahun 2018, yaitu karet dan kelapa sawit. Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, telah pula diikuti dengan berkembangnya industri hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit.

C. Perindustrian

Daya saing yang tinggi pada sektor pertanian, merupakan prasyarat dalam pengembangan agroindustri, dan daya saing tersebut merupakan interaksi keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis. Dengan proses produksi yang efisien dan biaya produksi yang semakin rendah, sektor industri, termasuk industri pengolahan akan mampu meningkatkan daya saing yang pada gilirannya akan dapat berkontribusi terhadap PDRB. Sebagai salah satu contoh capaian indikator kinerja, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Prindustrian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	2,73	2,98	3,08
Pertumbuhan industri	%	11,91	38,10	38,30

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

D. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.49
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Produksi perikanan	Ton	n.a	n.a	9.896,28
Konsumsi Ikan	%	n.a	102,73	62,26

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Ikan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik ke industri hulu (*backward linkage*) maupun hilir (*foreward linkage*), dan menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan selama kurun waktu 3 tahun yaitu 2016 hingga 2018, menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan, dimana capaian konsumsi ikan cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.50
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	2016	Tahun 2017	2018
Rumah Tangga Perikanan					
1	Perikanan Laut	RT	4.112	4.112	4.124
2	Perikanan Perairan Umum	RT	974	974	976
3	Tambak	RT	350	384	384
4	Kolam	RT	301	301	312
5	Keramba	RT	215	215	224
6	Budidaya Pantai / Sawah	RT	161	161	163
	Jumlah	RT	6.113	6.141	6.183
Produksi Hasil Perikanan					
1	Perikanan Laut	Ton	4.332,80	4.928,44	5.030,84

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
2	Perikanan Perairan Umum	Ton	928,45	954,67	1.184,34
3	Tambak	Ton	207,39	529,36	901,85
4	Kolam	Ton	175,68	843,55	1.213,47
5	Keramba	Ton	1,34	36,48	72,69
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ton	1.427	1.431,71	1.493,09
	Jumlah	Ton	7.068,66	8.724,21	9.896,28
Nilai Produksi Hasil Perikanan					
1	Perikanan Laut	Ribu Rp	120.276.179	147.853.200	150.925.200
2	Perikanan Perairan Umum	Ribu Rp	25.158.526,40	26.253.425	28.023.875
3	Tambak	Ribu Rp	10.730.100	28.161.952	47.978.420
4	Kolam	Ribu Rp	5.823.300	25.306.500	36.404.100
5	Keramba	Ribu Rp	86.900	1.094.400	2.180.700
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ribu Rp	4.269.000	44.278.000	4.461.406
	Jumlah	Ribu Rp	166.344.005,40	232.947.477	269.973.701

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Total rumah tangga perikanan mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Rumah tangga perikanan laut masih menjadi rumah tangga perikanan yang memiliki jumlah tertinggi. Tahun 2018 rumah tangga perikanan laut mencapai 4.124 RT di tahun 2018. Hal tersebut juga diikuti dengan produksi hasil perikanan laut yang terus meningkat. Total produksi hasil perikanan secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 7.068,66 Ton pada tahun 2016 menjadi 9.896,28 Ton tahun 2018. Meningkatnya RT dan hasil perikanan diikuti pula oleh nilai produksi hasil perikanan. Peningkatan nilai produksi hasil perikanan dari tahun 2016 hingga 2018 Rp103.629.695.600.

Total rumah tangga perikanan, jumlah produksi dan nilai produksi hasil perikanan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Ampai dengan tahun 2017, total rumah tangga perikanan sebanyak 6.141 rumah tangga. Rumah tangga perikanan laut menyumbang sekitar 66,95 persen dari total rumah tangga perikanan. Jumlah produksi perikanan juga

disumbang paling banyak oleh perikanan laut sebesar 4.928,44 Ton selama 4 tahun berturut-turut.

Penurunan rumah tangga perikanan ini disebabkan oleh banyaknya rumah tangga yang beralih mata pencaharian sebagai pengaruh dari kendala cuaca dan kelangkaan BBM. Penurunan rumah tangga perikanan ini pada gilirannya juga mempengaruhi perkembangan produksi hasil perikanan dan nilai hasil produksi yang menurun.

Meskipun sub sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang besar sebagai andalan pendapatan daerah maupun masyarakat dan telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis, namun kenyataannya dalam pengembangan sektor perikanan ke depan masih cukup banyak masalah dan tantangan yang harus akan dihadapi, diantaranya pemanfaatan sumberdaya perikanan umumnya masih rendah, ketersediaan prasarana perikanan masih terbatas, lemahnya pelaksanaan sistem MSC (*Monitoring, Control dan Surveillance*). Oleh karena itu, mengingat capaian beberapa indikator kinerja dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan produktivitas pada umumnya masih rendah, sehingga diperlukan perhatian yang lebih.

2.1.2.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

A. Administrasi Pemerintahan

Tabel 2.51
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator		Satuan	Tahun
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019			
Kabupaten Kutai Timur			

		2016	2017	2018
Jumlah SOP yang dimiliki Setda	SOP	na	293	456
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pada perkembangan tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa capaian jumlah SOP yang dimiliki Sekretariat Daerah semakin meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, capaian urusan sekretariat dewan selalu tersedia. Ini berarti pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD relatif sudah optimal.

B. Pengawasan

Opini atas penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan penggunaan keuangan daerah berlangsung sangat transparan dan akuntabel.

Tabel 2.52
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pengawasan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	-

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2015 hingga 2017, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencapai predikat WTP dari BPK. Peringkat ini diharapkan dapat tetap dipertahankan pada tahun 2018.

C. Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD. Kinerja perencanaan pembangunan selama tahun 2016 hingga 2018, capaian urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur selalu mencapai 100 persen.

Tabel 2.53
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Adanya konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena adanya proses pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga jalan panjang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud secara nyata. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

D. Keuangan

Kinerja bidang keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kondisi semakin membaik. Meskipun pada tahun 2016 dan 2017

khususnya mengalami penurunan pendapatan sebagaimana indikator capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.54
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Keuangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Persentase Aset Daerah Yang Terdata	%	100	100	100
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	(2,84)	(25,97)	34,26

Sumber: BPKAD dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

E. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur, pegawai pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus diberikan pelatihan dan peningkatan jenjang pendidikan.

Tabel 2.55
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Persentase distribusi ASN	%	na	100	91
Peningkatan SDM ASN	%	na	86	72

Sumber: Sekretariat Daerah, Bandiklat, BKD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

F. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.56
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Jumlah produk kelitbangan yang dihasilkan	Buku	na	1	0

Sumber: Badan dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Jumlah produk kelitbangan turun tahun 2017. Hasil produk kelitbangan sangat penting, agar dapat memberikan saran atau solusi guna memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan. Oleh karena itu, upaya harus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh sektor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan seterusnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar

untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Tabel 2.57
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu Rupiah	na	10.273	10.558

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

B. Pertanian

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kualitas hidup petani adalah besaran pendapatan petani. Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mendorong partisipasi petani dan masyarakat agar mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya secara profesional, efisien serta berdayaguna dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi secara tepat dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.58
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Nilai Tukar Petani	Indeks	na	na	na
Panjang Jalan Usaha Tani	km	52,18	63	90

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Rata-rata pendapatan petani secara makro dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya disparitas yang tinggi antar-masyarakat terutama petani dalam struktur ekonomi secara keseluruhan. Sudah jamak dimengerti dalam benak semua orang bahwa ketersediaan bahan pangan kerap dikaitkan dengan keterjangkauan harga pangan itu sendiri. Namun demikian, semakin murah harga barang pangan maka semakin kecil pendapatan yang didapatkan oleh petani dengan asumsi margin rantai distribusi bahan makanan adalah tetap. Dengan dasar pemikiran tersebut, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan petani. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah dapat mengatur harga panen menjadi tidak terlalu jatuh, namun harga akhir bahan pangan juga harus dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

C. Perindustrian dan Perdagangan

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan daya saing daerah adalah jumlah produk unggulan daerah yang mempunyai sertifikat. Hal ini disajikan dalam Tabel 2.59. Jumlah produk unggulan yang bersertifikat belum terdata pada tahun 2018.

Tabel 2.59
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Produk Unggulan Bersertifikat	Unit	52,18	63	na

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur Tahun 2019

2.1.3.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi Daya Saing Daerah terkait Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat dari indikator kinerja berikut.

A. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Penataan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Saing Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Ketaatan terhadap RTRW	%	100	98,96	98,96

Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan ketaatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terhadap RTRW pada tahun 2016-2018 telah optimal.

B. Energi dan Sumberdaya Mineral

Terkait dengan pembangunan energi, diawali dengan upaya meningkatkan rasio elektrifikasi penduduk. Selama tahun 2015-2017, upaya untuk meningkatkan rasio listrik semakin baik. Hal ini karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar. Tanpa daya listrik yang stabil, produktivitas kerja rumah tangga sulit untuk ditingkatkan.

Tabel 2.61
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017

Indikator	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	8	50	0,024
Rasio ketersediaan daya listrik	%	92	92	93

Sumber: PLN Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi suatu daerah, seperti tingkat keamanan, kecepatan proses pelayanan perijinan serta ada tidaknya pungutan berkaitan dengan minat dan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya.

1) Angka Kriminalitas

Tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun terjadi peningkatan angka kriminalitas yang cukup tinggi. Kasus pencurian merupakan tindak kriminal tertinggi setiap tahunnya. Adanya peningkatan gangguan keamanan, perlu mendapat perhatian lebih serius agar dapat lebih menjamin kantibmas agar kondusif untuk berinvestasi.

Tabel 2.62
Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2017

Indikator	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Angka Kriminalitas yang tertangani	%	34,00	71,33	66,11

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)

Menurut data BPS (2018), dari 9 (Sembilan) sektor kepolisian yang ada di Kabupaten Kutai Timur, empat sektor diantaranya yaitu: sektor Muara Wahau, sektor Sangatta Utara, sektor Bengalon dan sektor Sangkulirang; relatif menerima laporan kejadian kriminalitas lebih banyak dibanding sektor lainnya. Relatif tingginya angka kriminalitas di wilayah resort kepolisian ini mungkin terkait dengan luas wilayah kerja relatif dengan jumlah polisi. Secara

administrasi tiga dari empat kecamatan yang dimaksud mempunyai luas wilayah di atas 3.000 km².

Indikator keamanan merupakan salah satu prasyarat dari daya tarik iklim investasi disamping tersedia tidaknya infrastruktur penunjang. Agar iklim investasi dan masuknya PMDN dan PMA di Kabupaten Kutai Timur dapat ditingkatkan, maka efisiensi tugas kepolisian hendaknya ditingkatkan tanpa harus menambah jumlah polisi dalam waktu singkat. Salah satu cara yang dapat diambil adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan tugas polisi.

2) Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Demikian pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem yang baik pula.

2.1.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Tahun		
		2016	2017	2018
Rasio ketergantungan	%	39	38	39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur Tahun 2019 (diolah)

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh Penduduk Dewasa/PD (diasumsikan penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur yang tidak produktif yang diwakili oleh Penduduk Muda/PM dan Penduduk Tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.



BAB III

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah turut ditentukan oleh dua aspek penting yaitu: (a) kualitas perencanaan pembangunan daerah; dan (b) adanya daya dukung keuangan daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan dukungan anggaran atau keuangan daerah yang memadai. Keuangan atau kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional.

Kerangka ekonomi makro daerah mencerminkan kondisi dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian Kabupaten Kutai Timur tahun 2019. Kondisi tersebut juga menggambarkan prospek perekonomian tahun berjalan 2019. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah merepresentasikan dinamika ekonomi makro hingga semester satu tahun 2019, sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1 Perkembangan Perekonomian Global dan Nasional

Perekonomian global kedepannya, diprediksi masih akan tumbuh melambat. Hal ini ditandai dengan penurunan target pertumbuhan ekonomi oleh beberapa negara besar. Perlambatan ini masih dibayangi oleh isu perang dagang yang masih belum menemukan titik temu. Sementara perekonomian Indonesia diprediksi masih tumbuh positif dan stabil pada 5,2 persen. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring stabilnya tingkat inflasi dan meningkatnya bantuan sosial. Konsumsi LNPRRT akan tumbuh melambat pada sisa triwulan 2019 terkait dengan pelaksanaan pemilu nasional. Selain itu, investasi juga akan melambat, pengaruh tahun politik. Ekspor dan impor juga diprediksi melambat terkait lemahnya kondisi perekonomian global. Di sisi lain, sektor Pertanian pada triwulan II tahun 2019 diprediksi meningkat



seiring dengan pergeseran masa panen. Meski diperkirakan menguat, perekonomian domestik dibayangi beberapa risiko negatif yang dapat membuat realisasi pertumbuhan ekonomi meleset. Beberapa risiko utamanya adalah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, harga komoditas internasional yang menurun, realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dari target, ketidakpastian pasca pemilu nasional, dan kinerja sektor migas yang belum pulih (Bappenas, Juni 2019).

Tantangan perlambatan ekonomi global yang berdampak kepada ekonomi nasional mendorong pentingnya penguatan ekonomi domestik di tengah geliat digitalisasi ekonomi. Berlanjutnya pelemahan global pada 2019 berdampak pada menurunnya permintaan dari negara mitra dagang utama atas produk ekspor Indonesia. Namun, ekonomi berbagai daerah masih tertolong kuatnya permintaan domestik, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, masifnya inovasi digital membawa pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara masyarakat melakukan aktivitas ekonominya. Sehingga, penguatan permintaan domestik melalui integrasi ekonomi dan keuangan digital menjadi penting dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia (BI, Juni 2019).

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Perekonomian Kaltim triwulan I 2019 tumbuh sebesar 5,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 5,14% (yoy). Capaian pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2019 berada di atas level pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Kalimantan yang masing-masing tercatat sebesar 5,07% dan 5,33% (yoy). Secara spasial, Kaltim merupakan satu-satunya wilayah di Kalimantan yang mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2019. Di sisi lapangan usaha, optimalisasi produksi pertambangan batubara seiring dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya serta permintaan eksternal yang positif dari beberapa negara mitra dagang utama menjadi pendorong kinerja lapangan usaha ini. Lebih lanjut, penyelesaian beberapa proyek infrastruktur pemerintah dan beberapa pengerjaan konstruksi proyek Badan Usaha Milik Negara turut mendukung



kinerja perekonomian Kaltim triwulan I 2019. Sementara itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2019 di sisi pengeluaran bersumber dari akselerasi PMTB dan konsumsi swasta. Peningkatan kinerja investasi Kaltim didorong oleh investasi bangunan berupa pengerjaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah, proyek BUMN maupun swasta serta ekspansi lapangan usaha pertambangan yang masih berlanjut. Disamping investasi, konsumsi swasta dan pemerintah Kaltim tumbuh cukup tinggi sejalan dengan upaya penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah. Namun demikian, kinerja perekonomian Kaltim triwulan I 2019 tertahan oleh net ekspor antar daerah yang mengalami kontraksi pertumbuhan (BI, Mei 2019).

Pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2019 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja lapangan usaha tambang dan konstruksi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di sisi lapangan usaha. Peningkatan aktivitas lapangan usaha tambang tahun 2019 bersumber dari cuaca yang sampai dengan April 2019 relatif lebih mendukung aktivitas pertambangan. Meskipun hadir risiko penurunan harga komoditas utama tetapi tingkat harga masih berada dalam batas wajar sehingga masih memberikan sinyal positif pada pelaku usaha. Permintaan batubara dari India juga diperkirakan masih tinggi karena belum optimalnya infrastruktur penunjang distribusi batubara dalam negeri India. Konstruksi diperkirakan mengalami akselerasi terutama dari sisi pembangunan swasta. Perluasan kilang minyak Balikpapan menjadi salah satu pendorong di sisi swasta. Dengan rencana realisasi investasi pembangunan sebesar 16% dari keseluruhan nilai proyek perluasan kilang berpotensi mendorong peningkatan laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dan investasi di sisi pengeluaran.

Downside risk ekonomi Kalimantan Timur 2019 lebih bersumber dari eksternal. Harga batubara berisiko turun sehingga berdampak pada nilai ekspor yang lebih rendah pada 2019. Tensi dagang antar Tiongkok dengan Amerika Serikat juga berisiko menurunkan permintaan batubara impor Tiongkok. Selain risiko penurunan harga, perlambatan ekonomi dunia berdampak pada penurunan ekspor komoditas lainnya. IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2019 merevisi kebawah proyeksi pertumbuhan



ekonomi dunia dari 3,5% (yoy) menjadi 3,3% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Eropa diperkirakan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya akibat belum adanya kesepakatan Brexit. Lebih lanjut, deselerasi ekonomi Eropa berisiko menurunkan permintaan minyak kelapa sawit Kalimantan Timur (BI, Mei 2019).

3.1.3 Perekonomian Kabupaten Kutai Timur

Beberapa tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kutai Timur cukup terdampak oleh karena fluktuasi harga komoditas batubara yang cenderung turun karena merosotnya kebutuhan akan batubara di beberapa negara tujuan ekspor batubara. Mengingat hampir 80-85 persen PDRB Kabupaten Kutai Timur berasal dari Subsektor batubara, maka merosotnya harga komoditas batubara berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Perbaikan kinerja lapangan usaha tambang dan konstruksi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di sisi lapangan usaha. Peningkatan aktivitas lapangan usaha tambang tahun 2019 bersumber dari cuaca yang sampai dengan April 2019 relatif lebih mendukung aktivitas pertambangan. Meskipun hadir risiko penurunan harga komoditas utama tetapi tingkat harga masih berada dalam batas wajar sehingga masih memberikan sinyal positif pada pelaku usaha. Permintaan batubara dari India juga diperkirakan masih tinggi karena belum optimalnya infrastruktur penunjang distribusi batubara dalam negeri India. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 76K/30/MEM/2019 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Mei Tahun 2019, bahwa harga batubara sebesar 81,86 USD/ton.

Peranan sektor Pertambangan dan Galian masih menjadi sektor yang dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah dalam 5 (lima) tahun terakhir bergerak turun dari 81,77 persen tahun 2014, turun menjadi 80,90 persen pada tahun 2018. Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi sektor ini



menyumbang sebesar 7,72 persen pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 8,06 persen pada tahun 2018. Selanjutnya urutan ketiga sektor Industri pengolahan menyumbang sebesar 2,60 persen tahun 2014 menjadi 3,22 persen pada tahun 2018. Pergeseran dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian tersebut diharapkan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur menuju Kabupaten yang maju dalam sektor agribisnis dan agroindustry.

Tren positif sektor-sektor yang tergolong sebagai "Sektor Sekunder" ini menurut Pemenang Nobel Ekonomi Simon Kuznets (Todaro, 2011) menunjukkan salah satu ciri positif kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, dimana kontribusi sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi terhadap PDRB semakin meningkat.

Tabel 3.1
Nilai Sektor dalam PDRB ADHB
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2018 (dalam juta rupiah)

No	Sektor Usaha	2017 ^{a)}	%	2018 ^{b)}	%
		Harga berlaku		Harga berlaku	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian	9.129.987,80	7,75	9.952.622,71	8,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	96.064.874,80	81,54	99.937.948,04	80,90
3.	Industri Pengolahan	3.585.906,20	3,04	3.973.272,26	3,22
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.468,30	0,01	12.404,39	0,01
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.975,30	0,01	15.094,61	0,01
6.	Konstruksi	2.248.188,90	1,91	2.341.477,00	1,90
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.891.655,70	1,61	1.995.039,99	1,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.188.112,00	1,01	1.289.596,35	1,04
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244.767,10	0,21	261.934,44	0,21
10.	Informasi dan Komunikasi	287.943,80	0,24	312.214,92	0,25
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	161.293,60	0,14	167.989,14	0,14
12.	Real Estate	318.881,50	0,27	330.884,56	0,27
13.	Jasa Perusahaan	80.051,20	0,07	85.701,33	0,07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.121.053,40	0,95	1.189.058,40	0,96
15.	Jasa Pendidikan	1.119.270,20	0,95	1.279.165,69	1,04
16.	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	152.251,20	0,13	166.291,75	0,13
17.	Jasa Lainnya	198.304,40	0,17	220.866,84	0,18
Jumlah		117.816.985,40	100,00	123.531.562,42	100,00

Sumber: ^{a)} BPS Kab. Kutai Timur

^{b)} Angka Sangat Sementara dari BAPPEDA Kab. Kutai Timur



Kabupaten Kutai Timur juga memiliki banyak sumber daya alam yang dapat digunakan guna menopang pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada batubara meskipun secara perlahan. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten Kutai Timur harus mampu berkomitmen untuk merealisasikan pengurangan ketergantungan pada batubara di masa mendatang.

Perkembangan kontribusi sektoral menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas semakin meningkat kontribusinya selama 3 tahun berturut-turut. Sementara sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini mendominasi mengalami penurunan selama periode yang sama. Sementara itu, asumsi perkembangan ekonomi pada tahun 2019 masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya, terutama sektor pertanian dalam arti luas. Perkembangan ini, tentu sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 menuju "Kutai Timur Mandiri melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri". Peningkatan sektor selain pertambangan dan penggalian harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur penunjang sehingga sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada terselenggaranya efektivitas pemerintahan dengan mengklasifikasikan urusan pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu (1) urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, (2) urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, (3) urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.



Desentralisasi fiskal akan terlaksana dengan baik bila didukung oleh: a) pemerintah yang mampu melakukan pengawasan dan *law enforcement*; b) adanya sumber daya manusia yang kuat pada jajaran aparatur pemerintah daerah; c) serta adanya keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah dalam fungsi alokasi menjadi semakin besar terutama untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebih mempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Dengan demikian, penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dibangun, antara lain melalui kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses memperoleh layanan publik, sinergitas pembangunan kebijakan antara pusat dan daerah maupun antardaerah.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama semester pertama serta kebijakan transfer daerah dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan daerah. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggali segala potensi yang ada di daerah dan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar terwujud kemandirian daerah serta kesinambungan pembangunan dapat diwujudkan meskipun selama ini proporsinya masih terbilang kecil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan dengan melalui upaya-upaya antara lain: mengoptimalkan penggarapan sumber/potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur, menerapkan kebijakan pendapatan



daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.

Pada perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019, diproyeksikan pendapatan daerah mengalami penurunan dari proyeksi sebelumnya. Perubahan proyeksi Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,13 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp 164.584.524.300,00 menjadi sebesar Rp142.584.524.300,00 (atau **turun** sebesar Rp 22.000.000.000,00). Penurunan ini terutama pada pendapatan dari Pajak Daerah. Rincian besaran Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah pada perubahan RKPD tahun 2019 diproyeksikan turun sebesar 0,27 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp82.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 60.000.000.000,00 (atau turun sebesar Rp22.000.000.000,00). Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan proyeksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami **penurunan** sebesar 0,11 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp7.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.200.000.000,00 atau turun sebesar Rp800.000.000,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami **kenaikan** sebesar 0,01 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp67.208.344.300,00 menjadi sebesar Rp68.008.344.300,00 atau naik sebesar Rp800.000.000,00.



2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 diproyeksikan mengalami **penurunan** sebesar 0,06 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp2.331.845.508.600,00 menjadi sebesar Rp 2.202.199.352.349,00 (atau **turun** sebesar Rp 129.646.156.251,00). Penurunan tersebut melalui penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak melalui dana kurang salur. Pada perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami **penurunan** sebesar 0,08 persen, yaitu dari sebelum perubahan sebesar Rp 1.541.886.289.600,00 turun menjadi sebesar Rp1.412.240.133.349,00 (atau **turun** sebesar Rp129.646.156.251,00). Sedangkan, DAU dan DAK tidak mengalami perubahan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami **penurunan** sebesar 0,06 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp863.509.382.490,00 menjadi sebesar Rp813.213.657.150,00 (atau turun sebesar Rp 50.295.725.340,00). Penurunan tersebut melalui pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada perubahan RKPD Tahun 2019 diproyeksikan mengalami **penurunan** sebesar 0,1 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp502.957.253.400,00 menjadi sebesar Rp452.661.528.060,00 (atau turun sebesar Rp50.295.725.340,00). Sementara itu, Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pendapatan Lainnya (Dana Desa) diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019 dapat di lihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:



Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (dalam rupiah)

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan*	Setelah Perubahan**	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	164.584.524.300,00	142.584.524.300,00	(22.000.000.000,00)	(0,13)
1.1.1	Pajak Daerah	82.000.000.000,00	60.000.000.000,00	(22.000.000.000,00)	(0,27)
1.1.2	Retribusi Daerah	7.000.000.000,00	6.200.000.000,00	(800.000.000,00)	(0,11)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.376.180.000,00	8.376.180.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	67.208.344.300,00	68.008.344.300,00	800.000.000,00	0,01
1.2	Dana Perimbangan	2.331.845.508.600,00	2.202.199.352.349,00	(129.646.156.251,00)	(0,06)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.541.886.289.600,00	1.412.240.133.349,00	(129.646.156.251,00)	(0,08)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	582.721.208.000,00	582.721.208.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	207.238.011.000,00	207.238.011.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	863.509.382.490,00	813.213.657.150,00	(50.295.725.340,00)	(0,06)
1.3.1	Hibah	60.150.198.090,00	60.150.198.090,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	502.957.253.400,00	452.661.528.060,00	(50.295.725.340,00)	(0,1)
1.3.4	Dana Penyesuaian	33.274.329.000,00	33.274.329.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	95.250.000.000,00	95.250.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	171.877.602.000,00	171.877.602.000,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.359.939.415.390,00	3.157.997.533.799,00	(201.941.881.591,00)	(0,06)

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2019

Keterangan: *) Perda APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019

**) TAPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019



3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Dengan demikian pelayanan publik di daerah berkorelasi erat dengan kebijakan Belanja Daerah.

Fokus aktivitas pemerintah daerah adalah belanja. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, aktivitas belanja ini bersifat fleksibel dengan tetap konsisten pada prioritas dan tujuan daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Peningkatan kualitas layanan tersebut diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan memengaruhi kemajuan perekonomian daerah secara luas. Kebijakan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengacu pada prinsip *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Hal ini berarti, alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kabupaten Kutai Timur menentukan Kebijakan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan dan permasalahan yang dihadapi dan harus dituntaskan. Berikut adalah kebijakan Belanja Kabupaten Kutai Timur tahun 2019:

- a. Belanja Langsung urusan wajib pelayanan dasar digunakan untuk peningkatan dan aksesibilitas pelayanan dasar yang berasal dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Belanja ini diutamakan untuk membiayai program-program yang masuk prioritas pembangunan Tahun 2019 dan kebutuhan rutin dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b. Belanja Langsung urusan wajib non pelayanan dasar meliputi 18 urusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



- c. Belanja Langsung urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Belanja ini diutamakan untuk program/kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah tahun 2016-2021 serta tema pembangunan tahun 2019 yaitu pemantapan produksi pangan dan komoditas unggulan.
- d. Mendukung efektivitas dan efisiensi operasional yang berdampak pada peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta terciptanya *good government governance*.
- e. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- f. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- h. Belanja tidak terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam.
- i. Berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis yang mendukung agenda nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 meliputi: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

a) Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja berupa Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tambahan penghasilan untuk PNS, uang representasi DPRD, Gaji bupati dan wakil bupati dan sebagainya. Besarnya alokasi untuk



gaji dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2019, perhitungan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, serta memperhitungkan *acress* gaji. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengalokasikan anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada PNS yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

b) Belanja Subsidi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menganggarkan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar tarif penggunaan air PDAM terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya dinilai masih terbatas.

c) Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menganggarkan Belanja hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik. Penentuan penerima hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan tentang hibah.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penerimanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan langsung didasarkan kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.



e) Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

Alokasi belanja di desa difokuskan untuk meningkatkan IPD dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Pada tahun 2019, kebijakan Belanja yang berlokasi di desa tersebut dialokasikan kurang lebih 1 miliar per desa. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangan tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

f) Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh terhadap pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.



2. Belanja Langsung

Belanja Langsung diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keluaran dari belanja langsung harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Penganggaran Belanja Langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar, dan urusan pilihan. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, Standar Satuan Harga, dan Analisis Standar Belanja (ASB). Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa mengacu pada peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran honorarium bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dimaksud untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.

c. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memprioritaskan alokasi belanja modal tahun 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.3
Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (dalam rupiah)

NO (1)	Uraian (2)	Jumlah Sebelum Perubahan*) (3)	Jumlah Setelah Perubahan**) (4)	Bertambah/Berkurang Rp (5)	% (6)
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.161.534.223.692,00	1.161.534.223.692,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	662.263.234.079,00	662.263.234.079,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	6.045.683.535,00	6.045.683.535,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	90.080.954.318,00	90.080.954.318,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.660.000.000,00	4.660.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	380.484.351.760,00	380.484.351.760,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	2.347.691.490.698,00	2.347.691.490.698,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	190.442.600.817,00	190.442.600.817,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.061.513.498.691,00	1.061.513.498.691,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	1.095.735.391.190,00	1.095.735.391.190,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.509.225.714.390,00	3.834.646.478.528,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2019

Keterangan: *) Perda APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

**) TAPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019



3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pada tahun 2019 khususnya pada perubahan RKPD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berencana menetapkan kebijakan pinjaman daerah dari lembaga keuangan Bank. Pinjaman daerah tersebut dilakukan guna mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Perubahan RKPD tahun 2019 bersumber dari Pinjaman Daerah diproyeksikan sebesar Rp273.572.598.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD tahun 2019 sebesar diproyeksikan sebesar Rp124.286.299.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00. Sedangkan pembayaran pokok utang sebesar Rp120.286.299.000,00.

Berikut Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:



Tabel 3.4
Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 (dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Target/Proyeksi	
		Sebelum Perubahan*	Setelah Perubahan**	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	273.572.598.000,00	273.572.598.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	273.572.598.000,00	273.572.598.000,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	124.286.299.000,00	124.286.299.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	120.286.299.000,00	120.286.299.000,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(201.941.881.591,00)	(201.941.881.591,00)	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Keterangan: *) Perda APBD Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2019

**) TAPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019



BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perbaikan pendapatan masyarakat dengan investasi dan pembangunan infrastruktur. *Equal opportunity* atau pemerataan kesempatan menjadi hal yang penting setelah adanya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pada tahun 2019 pemerintah mengangkat tema RKP ***“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”***.

Terdapat lima prioritas pembangunan nasional pada tahun 2019 yang nantinya dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas berikut:

Pertama, pemerintah akan fokus dalam pembangunan manusia, dengan fokus mengenai pelayanan dasar terhadap warga negara. Selain dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perbaikan pada masalah gizi buruk juga menjadi prioritas nasional dan fokus pembangunan manusia.

Kedua, pengurangan kesenjangan antara wilayah dengan fokus untuk perbaikan konektivitas sehingga dapat mengurangi biaya logistic. Adanya tol laut pun membuat pengangkutan logistic menjadi lebih efektif.

Ketiga, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur dan jasa. Salah satu prioritasnya adalah bagaimana agar pertumbuhan manufaktur tanah air bisa tumbuh di atas 5% serta pariwisata dapat terus tumbuh sebagai penyumbang devisa yang penting ditambah dengan aspek perbaikan tenaga kerja. Selain pendidikan vokasi tapi juga standar kerja dan kompetensi dari tenaga kerja.



Keempat, mengenai ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan.

Kelima, adalah stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilihan umum (Pemilu), dimana tahun 2019 merupakan pesta politik bagi Indonesia untuk memiliki pemimpin baru.

Berdasarkan RKP tahun 2019, Pemerintah Pusat telah menetapkan tema pembangunan **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"**.

RKP Tahun 2019 menetapkan 5 prioritas nasional, antara lain:

1. **Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar** melalui arah kebijakan:
 - a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
 - 1) Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
 - 2) Penguatan sistem jaminan sosial
 - 3) Penguatan literasi untuk kesejahteraan
 - 4) Pelaksanaan reforma agraria
 - 5) Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - 2) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana
 - 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit
 - 4) Percepatan penurunan *stunting*
 - 5) Penguatan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat".
 - c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - 1) Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata
 - 2) Penyediaan afirmasi pendidikan
 - 3) Penguatan kelembagaan satuan pendidikan
 - 4) Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik.



- d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
 - 1) Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau
 - 2) Penyesiaan akses infrastruktur dasar permukiman layak
 - 3) Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman
- e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
 - 1) Penguatan layanan dan rujukan satu pintu
 - 2) Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - 3) Percepatan pencapaian SPM di daerah
- 2. **Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman** melalui arah kebijakan:
 - a. Peningkatan konektivitas
 - 1) Pengembangan pelabuhan hub dan *feeder* tol laut
 - 2) Pembangunan transportasi multimoda
 - 3) Pembangunan bandara
 - b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
 - 1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana informatika
 - 3) Pengembangan infrastruktur TIK menuju *e-digital*
 - c. Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa
 - 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk Kawasan transmigrasi
 - d. Pembangunan Daerah Afirmasi
 - 1) Pengembangan aksesibilitas pada Kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi
 - e. Pembangunan Konektivitas untuk Mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu-Hilir Perikanan
 - 1) Pembentukan system logistik ikan nasional



- 2) Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) terpilih
 - 3) Rehabilitasi dan peningkatan layanan pelabuhan perikanan
 - 4) Pengadaan kapal angkut ikan berpendingin dan garam
 - 5) Pembentukan kelembagaan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penyelesaian rencana zonasi pesisir dan laut.
3. **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif** melalui arah kebijakan
- a. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
 - 1) Peningkatan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan jasa lingkungan
 - 2) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
 - 3) Peningkatan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
 - 4) Penguatan kelembagaan dan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
 - 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian dan perikanan
 - b. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan
 - 1) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi
 - 2) Perbaikan struktur industri
 - 3) Peningkatan daya saing industri
 - 4) Fasilitasi pengembangan 7 kawasan industri dan 6 KEK industri/logistik
 - c. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif
 - 1) Percepatan pengembangan 7 kawasan pariwisata, dan 2 KEK pariwisata
 - 2) Penguatan struktur ekonomi kreatif
 - 3) Pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)



- 4) Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri
 - 5) Perluasan akses keuangan/pembiayaan
 - d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
 - 1) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
 - 2) Penguatan penyelenggaraan diklat vokasi
 - 3) Pemantapan sistem sertifikasi kompetensi
 - 4) Peningkatan ketrampilan wirausaha
 - e. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
 - 1) Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas
 - 2) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas
 - 3) Penyiapan SDM Iptek (peneliti, perekayasa)
 - 4) Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier.
4. **Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air** melalui arah kebijakan:
- a. Peningkatann Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
 - 1) Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi
 - 2) Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik
 - 3) Pengembangan EBT
 - 4) Peningkatan pemanfaatan batubara dan gas bumi dalam negeri
 - 5) Peningkatan efisiensi energi
 - b. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
 - 1) Peningkatan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan
 - 2) Peningkatan sistem logistik pertanian dan perikanan



- 3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
- 4) Penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan
- 5) Penguatan cadangan dan stabilisasi harga pangan
- c. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air
 - 1) Perlindungan sumber air dan ekosistemnya
 - 2) Pembangunan sarana prasarana sumber daya air
 - 3) Pemulihan dan pengendalian air permukaan dan air tanah
 - 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya air
- d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
 - 1) Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - 2) Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
 - 3) Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - 4) Penguatan ketahanan terhadap bencana
- e. Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan SD Air
 - 1) Penyempurnaan regulasi migas dan pertambangan
 - 2) Penguatan pembiayaan pertanian dan perikanan
 - 3) Pemanfaatan inovasi teknologi dan penguatan penyuluhan pendampingan pertanian dan perikanan
 - 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan sumber daya air
 - 5) Penguatan kelembagaan di bidang lingkungan hidup

5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
melalui arah kebijakan

- a. Kamtibmas dan Keamanan Siber
 - 1) Penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap
 - 2) Penanganan konflik sosial



- 3) Penanganan penyalahgunaan narkoba
- 4) Penguatan kelembagaan siber serta identifikasi, deteksi, proteksi penanggulangan, dan pemulihan dampak kejahatan siber
- 5) Penanggulangan terorisme
- b. Kesuksesan Pemilu
 - 1) Penguatan lembaga demokrasi
 - 2) Peningkatan kebebasan sipil dan hak-hak politik
 - 3) Netralitas birokrasi dalam pemilu 2019
 - 4) Pengamanan pemilu
- c. Pertahanan Wilayah Nasional
 - 1) Pengamanan wilayah laut
 - 2) Pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara
 - 3) Penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi
- d. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Penegakan hukum
 - 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - 3) Pelaksanaan *e-Government* yang terintegrasi
 - 4) Talent Management Nasional
 - 5) Pengawasan program prioritas nasional 2019
- e. Efektivitas Diplomasi
 - 1) Perlindungan dan Pelayanan WNI di luar negeri
 - 2) Penguatan diplomasi maritim, politik, dan keamanan
 - 3) Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional
 - 4) Pemantapan peran Indonesia di ASEAN

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019 disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan

pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun strategi pembangunan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tema **"Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri"**. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2019, yakni:

1. Penguatan pendidikan vokasi dan ketrampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
2. Peningkatan kemudahan berusaha dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berkelanjutan;
4. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas sentra produksi, kawasan industri dan outlet;
5. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan publik.

4.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2019 adalah **"Pemantapan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan"**. Berdasarkan tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019. Selain mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 juga harus memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 serta hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2018.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur (RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Dasar
- b. Peningkatan Produksi Pangan
- c. Peningkatan Infrastruktur Dasar
- d. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan



- e. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan **5 (lima) prioritas** pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 serta berbagai hasil analisis isu-isu eksternal yang terdiri dari isu internasional, nasional, regional (Kaltim) dan isu-isu internal yang terdiri dari isu bidang sosial budaya, ekonomi, sarana prasarana, pemerintahan, maka dapat dijelaskan fokus 5 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Dasar, melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas pendidikan
- b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas kesehatan
- c. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendapatan
- d. Peningkatan ketrampilan kerja
- e. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
- f. Peningkatan kehidupan beragama dan seni budaya

2. Peningkatan produksi pangan, melalui:

Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan berkelanjutan:

- a. Penguatan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal (intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi);
- b. Pemanapan pondasi (*capacity building*, pelebagaan) menuju terbangunnya pondasi pertanian:
- c. Perbenihan
- d. Penyuluhan
- e. Penyedia sarana produksi
- f. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas produk pangan;
- g. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas produk komoditi agribisnis unggulan.

3. Peningkatan infrastruktur Dasar, melalui:

Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum:

- a. Pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi;
- b. Peningkatan akses infrastruktur dasar: air baku, air bersih dan listrik



- c. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta keterhubungan antar desa;
- d. Perluasan dan pemerataan pemukiman layak huni;

4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan, melalui:

- a. Pengembangan komoditas agribisnis potensi unggulan daerah menuju daya saing daerah:
 - 1) Penetapan komoditas agribisnis potensi unggulan;
 - 2) Klasterisasi desa berbasis industri prioritas komoditas agribisnis menuju terciptanya kawasan pertanian terpadu;
 - 3) Penguatan sektor UKM yang berbasis ekonomi kreatif.
- b. Peningkatan kualitas SDM berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG) mendukung pengembangan komoditas daya saing unggulan:
 - 1) Percepatan penguasaan dan penyebaran TTG;
 - 2) Peningkatan kualitas mutu hasil produksi masyarakat;
 - 3) Pengembangan pemanfaatan TTG untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.
- c. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi (ekowisata):
 - 1) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal
 - 2) Pembangunan destinasi pariwisata;
 - 3) Pemasaran Pariwisata.

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan, melalui:

- a. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah:
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM aparatur;
 - 2) Penguatan kelembagaan desa;
 - 3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;



- 4) Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian untuk pengambilan kebijakan.

Penjelasan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pelayanan Dasar, difokuskan melalui:

a. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan

Peningkatan alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan IPM dan pengurangan kemiskinan (Widodo, 2011). Peningkatan IPM berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada gilirannya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan hampir selalu identik dengan pedesaan dan pertanian, dimana lebih dari 60 persen orang miskin pada umumnya hidup di pedesaan dan sekitar 40 persen tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga strategi pembangunan pertanian Kutai Timur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih berorientasi pada petani kecil dan menyasar pada daerah-daerah pedesaan, pedalaman dan wilayah pinggiran yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

Pembangunan Pendidikan di Kutai Timur pada tahun 2019 difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan ditujukan pada: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif.

b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat di Kutai Timur telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan dan antar wilayah pedesaan dan



perkotaan masih merupakan masalah yang perlu lebih diperhatikan. Selain itu masih cukup tingginya kematian bayi dan kematian ibu, malnutrisi, beban ganda penyakit merupakan sebagian hambatan daya saing masyarakat Kutai Timur. Oleh karena itu Kabupaten Kutai Timur mengarahkan pembangunan kesehatan untuk akselerasi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa, selanjutnya berdampak pada rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin juga dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (*cost barrier*).

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, kondisi kesehatan lingkungan, kinerja pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kabupaten Kutai Timur mengarahkan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, juga mengupayakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai pondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan kesehatan di Kutai Timur dengan fokus peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas kesehatan ditujukan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin guna untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) pemerataan tenaga medis/kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

c. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendapatan

Penanggulangan kemiskinan, sudah mulai membuahkan hasil, namun capaiannya masih belum menggembirakan. Aksesibilitas terhadap lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan masih merupakan kendala, yang



diperburuk dengan adanya peningkatan pemutusan hubungan pekerjaan seiring dengan lesunya aktivitas pertambangan dan kegiatan ekonomi terkait stagnan yang berujung pada penurunan pendapatan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi Kabupaten Kutai Timur diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berdampak penggandaan (*multiplier effect*) pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk dan pengurangan kemiskinan terutama di pedesaan.

d. Peningkatan ketrampilan kerja.

Kesenjangan produktivitas tenaga kerja antara sektor pertanian dengan non pertanian masih cukup besar. Selain perluasan lapangan kerja yang produktif, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang rendah, peningkatan produktivitas akan sulit dicapai akibatnya pendapatanpun akan sulit ditingkatkan. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pendidikan vokasi, pelatihan ketrampilan tenaga kerja, pemagangan dan lainnya. Karena sektor pertanian merupakan penyerap terbesar tenaga kerja di Kutai Timur dan sesuai visi-misi pembangunan yang berbasis agrobisnis dan agroindustri, maka peningkatan ketrampilan kerja diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian guna memantapkan agribisnis sebagai pondasi pembangunan ekonomi Kutai Timur.

e. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

Tingginya tingkat kerentanan menyebabkan tingginya kemungkinan penduduk menjadi miskin. Guna mencegah semakin besarnya kemungkinan tersebut, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk menjamin penduduk yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan penduduk yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. Program peningkatan perlindungan sosial di Kabupaten Kutai Timur, diarahkan untuk mengantisipasi dan membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi goncangan (*shock*) seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga,



kehilangan pekerjaan, musibah bencana alam atau lainnya dalam kehidupannya agar tidak jatuh menjadi miskin.

f. Peningkatan kehidupan beragama dan seni budaya

Keberadaan lembaga dan sarana seni budaya di Kabupaten Kutai Timur sangat mendukung pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Pengembangan sumberdaya manusia yang potensial dalam bidang seni dan budaya dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan serta pelestarian situs dan kawasan cagar budaya. Pelestarian kebudayaan, juga diarahkan untuk pengembangan semangat kewirausahaan dalam mendukung agro ekowisata.

2. Peningkatan infrastruktur Dasar

Infrastruktur mempunyai kontribusi besar dan penting dalam meningkatkan output sektor lain dan meningkatkan pertumbuhan sektor hulu dari pada hilirnya yang mempunyai dampak yang besar terhadap percepatan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan investasi pada sektor ekonomi lainnya juga berdampak secara total terhadap pengentasan kemiskinan dan memberikan pendapatan yang lebih baik serta penguatan terhadap kualitas modal manusia (Permana dan Asmara, 2010).

Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 selain infrastruktur dasar, juga lebih difokuskan untuk menunjang sektor pertanian guna memantapkan kemampuan produksi pangan dan komoditas unggulan. Pengembangan infrastruktur pertanian harus diarahkan untuk menghidupkan sistem agribisnis setempat secara efisien, mandiri dan berkelanjutan, meliputi:

a. Pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi

Pembangunan sarana irigasi dan sistem jaringan drainase memiliki peranan penting bagi peningkatan kapasitas produksi pertanian. Ketersediaan air yang cukup dan merata, selain sangat penting dalam kegiatan bidang pertanian, juga memiliki manfaat strategis terhadap pemenuhan kebutuhan air bidang lainnya dalam kehidupan masyarakat



sehari-hari. Perluasan irigasi diarahkan pada usaha-usaha pertanian yang telah dirintis oleh masyarakat petani, termasuk pengembangan lahan tadah hujan daripada membuka area baru.

b. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta keterhubungan antar desa

Transformasi wilayah pedesaan menjadi suatu daerah agroindustri sudah menjadi tuntutan nyata dalam proses perkembangan modernisasi pertanian mendatang yang berbasis di wilayah pedesaan. Mengingat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, pandangan inferior atas wilayah pedesaan harus diubah dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang pertanian secara terpadu sehingga pembangunan wilayah kota atau daerah pedesaan sebagai kesatuan. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam akselerasi koneksitas wilayah pedesaan dengan perkotaan yang berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, baik kegiatan pertanian maupun non pertanian.

c. Peningkatan akses infrastruktur dasar: air baku, air bersih dan listrik

Infrastruktur air bersih, air limbah, drainase, dan sampah merupakan infrastruktur dasar sangat penting. Infrastruktur dasar disediakan untuk mempertahankan kehidupan dan penghidupan penduduk. Penyediaan layanan, baik air minum maupun air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Ketersediaan air yang memadai menjadi salah satu penentu dalam peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan maupun produktifitas masyarakat di bidang ekonomi.

d. Perluasan dan pemerataan pemukiman layak huni



Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman, baik dari segi perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Pemerintah daerah Kutai Timur berkomitmen untuk menciptakan permukiman layak huni dan berkelanjutan dengan mengupayakan pembangunan prasarana dan sarana di berbagai bidang permukiman, air minum dan sanitasi. Kondisi lingkungan sehat, antara lain tercermin dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar.

e. Pemerataan sarana kesehatan

Rata-rata setiap 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 3,5 puskesmas. Selain jumlahnya sarana yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit masih menjadi kendala di Kabupaten Kutai Timur. Kendala keterbatasan sarana kesehatan tersebut, juga diperburuk dengan adanya keterbatasan jumlah pada hampir semua jenis tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang masih belum merata.

3. Peningkatan produksi pangan

Integrasi antara konsep pembangunan desa dan agrobisnis-agroindustri menjadi penting keterkaitannya dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, teknologi, serta dukungan sistem tataniaga dan perdagangan yang efektif dalam mewujudkan peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan berkelanjutan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi (ketersediaan), melainkan juga pada subsistem distribusi dan subsistem konsumsi.



Peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan daerah, baik dari ketersediaan (*availability*) maupun kemudahan akses (*accessibility*) sebagai pilar utama dalam terwujudnya kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan kompetitif daerah berbasis agribisnis. Pengurangan ketergantungan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam batubara perlu lebih memperoleh penekanan. Kondisi ini diarahkan agar ketercapaian terhadap visi Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pembangunan yang bertumpu pada agribisnis dan agriindustri, secara bertahap akan mampu dicapai.

Peningkatan kemampuan dan produktivitas produksi pertanian dalam arti luas (tanaman pangan utama, perikanan dan perternakan sumber protein) dengan berbagai strategi (intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi) yang dilakukan merupakan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi tersebut, maka tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur fokus pada beberapa hal, yaitu:

- a. Penguatan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal
- b. Pemantapan pondasi (*capacity building*, kelembagaan) menuju industrialisasi pertanian dan perdesaan terpadu menuju terbangunnya pondasi pertanian
- c. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas produk pangan.

4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan

a. Pengembangan komoditas agribisnis potensi unggulan daerah menuju daya saing daerah:

Pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah membutuhkan kerjasama yang sinergis mulai dari pemasaran hasil dan olahan, pengolahan, budidaya sampai pengadaan sarana produksi dalam membangun suatu sistem agroindustri dan agrobisnis yang kokoh.



Pengembangan agroindustri dan agrobisnis pada dasarnya diharapkan selain memacu pertumbuhan tingkat ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi tersebut di atas, perumusan perencanaan pengembangan komoditas unggulan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah, ketersediaan teknologi serta sistem agribisnis stempat secara efisien. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pembangunan wilayah

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani. NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian) merupakan indikator kesejahteraan petani. NTP berkaitan dengan kemampuan dan daya beli petani dalam membiayai hidup rumah tangganya. Keberhasilan pembangunan pertanian diikuti oleh perubahan secara struktural pada sektor perekonomian (Syekh, 2013). Sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur lebih didominasi Subsektor Perkebunan (Kelapa sawit). Sebagian besar subsektor perkebunan merupakan komoditas yang berorientasi ekspor, dimana NTP dan NTUP (Nilai Tukar Usaha Petani) komoditas subsektor perkebunan dipengaruhi oleh harga energi dunia seperti yang terjadi pada tiga tahun terakhir. Strategi yang ditempuh guna meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani diantaranya adalah: (1) aspek hulu dan *on farm* yakni melakukan akselerasi peningkatan produksi dan kualitas produk. Strategi ini dengan memberi kemudahan agro-input berupa subsidi pupuk, benih dan berbagai bantuan, membangun infrastruktur, asuransi usaha tani, (2) aspek hilir, yakni dilakukan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah, pengaturan tata niaga, serta mengendalikan impor mendorong ekspor.

Komoditas agribisnis termasuk komoditas yang dapat diperbaharui dan dikembangkan secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif. Agar pengembangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat, maka diperlukan sinergitas antara pemangku kepentingan, diantaranya adalah UMKM. Pemerintah harus hadir



dan berperan sebagai mediator melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran untuk percepatan terciptanya komoditas agribisnis unggulan. Revitalisasi sektor pertanian meliputi pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan sekolah kejuruan pertanian sebagai penyedia SDM pertanian, modernisasi sistem pertanian termasuk membangun *market structure* yang efisien untuk *agro products*.

Orientasi pembangunan agribisnis dan agroindustri hendaknya tidak dilepaskan dari usaha meningkatkan mutu SDM dan kemampuannya dalam mengoptimalkan SDA dan lainnya setempat. Sehingga seharusnya, setiap wilayah kecamatan/desa dengan **keunikan lokasi** memiliki komoditas unggulan agribisnis yang mampu memicu sektor-sektor lainnya ikut berkembang sebagai *multiplier effect*. Adapun sektor-sektor lain yang segera dapat berkembang seiring dengan komoditas agribisnis adalah hotel, restoran dan perdagangan, pariwisata, perbankan dan investasi, serta usaha transportasi dan komunikasi. Apabila kondisi tersebut terwujud maka agribisnis dan agroindustri berfungsi sebagai transformasi ekonomi andalan dan berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur serta dan berdaya saing.

Fokus pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah pada tahun 2019 ditujukan pada:

- 1) Pemantapan komoditas agribisnis potensi unggulan;
- 2) Klasterisasi wilayah (kecamatan/desa) berbasis industri prioritas komoditas agribisnis menuju terciptanya kawasan pertanian terpadu;
- 3) Percepatan pembangunan KEK MBTK;
- 4) Penguatan sektor UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.

b. Peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi tepat guna dan kesejahteraan masyarakat

Pengembangan agribisnis-agroindustri pada dasarnya diharapkan selain memacu pertumbuhan tingkat ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui perluasan kesempatan kerja dan pendapatan petani, sedangkan strategi

pengembangan SDM diarahkan untuk menguatkan semangat kewirausahaan dan memotivasi berprestasi dibidang usaha pertanian pedesaan. Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi tersebut di atas, perumusan perencanaan pembangunan agribisnis-agroindustri dipedesaan, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna.

Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengolahan merupakan salah satu alternatif penganekaragaman produk sebagai penunjang agroindustri yang sesuai untuk tingkat pedesaan dan meningkatkan nilai tambah komoditas. Di samping itu dengan lebih beragamnya produk olahan diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan. Dampak pengembangan agroindustri di pedesaan antara lain dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha di bidang pengolahan pangan, bengkel peralatan dan meningkatkan status gizi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangannya perlu diupayakan terus-menerus, terutama agroindustri rumah tangga yang bahan bakunya sudah tersedia (Antarlina dan Umar, 2006).

Kabupaten Kutai Timur perlu memperkenalkan TTG sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan. Pemanfaatan TTG diharapkan dapat memotivasi terciptanya ide-ide kreatif sebagai dasar berinovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Pendayagunaan sarana yang ada di Kabupaten Kutai Timur diantaranya melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi setempat, Sekolah vokasi untuk meningkatkan dayaguna TTG agar dimanfaatkan secara luas.

Fokus pelaksanaan TTG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2019 diarahkan sebagai berikut:

- 1) Percepatan penguasaan dan penyebaran TTG;
- 2) Peningkatan kualitas hasil produksi masyarakat;
- 3) Pengembangan pemanfaatan TTG untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.



c. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi (ekowisata).

Ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Secara umum pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga kualitas lingkungan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, maka perencanaan tentang ekowisata harus dituangkan RKPD.

Kabupaten Kutai Timur, selain memiliki kekayaan tambang, juga memiliki keragaman hayati dan budaya yang potensial, meski hingga kini masih belum dikelola secara optimal sehingga belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Kabupaten Kutai Timur memiliki unsur-unsur yang dapat dikembangkan sebagai ekowisata. Unsur-unsur tersebut meliputi: 1). Sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya Kekayaan keanekaragaman hayati; 2). Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang alam dan budaya setempat; 3). Pasar yang mencerminkan adanya kecenderungan peningkatan permintaan terhadap produk ekowisata baik di tingkat internasional dan nasional. Ekowisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur adalah ekowisata berbasis masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan dalam pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati, diarahkan dalam rangka inisiasi pengembangan sektor ekonomi kreatif dan Inisiasi pengembangan sektor industri pariwisata berbasis ekologi dan pertanian (ekowisata agro) dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

Fokus peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi (ekowisata) adalah sebagai berikut:



- 1) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri melalui: (1) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata yang menjadi fokus: (a) wisata alam; (b) wisata budaya; (2) meningkatkan citra kepariwisataan dan pergerakan wisatawan nusantara; (3) tata kelola destinasi; serta (4) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata;
- 2) Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kerjasama internasional kepariwisataan dan mendatangkan sebanyak mungkin kunjungan wisatawan mancanegara.

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Berkaitan dengan tantangan ke depan dan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang menempatkan peran strategis agribisnis dan agroindustri dalam pembangunan daerah, maka peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi faktor penting untuk lebih memperkuat manajemen penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mereposisi sektor pertanian sebagai pondasi pembangunan agribisnis dan agroindustri di Kutai Timur.

a. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah

Keberhasilan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada pemberian pelayanan tersebut, ini dapat dikaji melalui mutu dan kualitas layanan tersebut. Menurut Syamsudin (2012) Mutu dan kualitas layanan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: 1) Faktor kesadaran aparat; 2) Faktor aturan; 3) Faktor Organisasi; 4) Faktor Pendapatan; 5) Faktor kemampuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan; dan 6) Faktor sarana pelayanan.

Pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang efektif diperlukan adanya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumberdaya manusia aparatur. Reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari



reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen SDM aparturnya. Peningkatan kualitas SDM Aparatur, termasuk aparatur terkait sektor agribisnis-agroindustri merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam mendukung pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik sehingga ganjalan birokrasi dilapangan dapat diminimalkan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus membudayakan pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan berbasis fakta. Perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan dan mendayagunakan hasil penelitian yang relevan dan informasi lainnya, mengacu pada: 1) UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan serta 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Fokus Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah pada tahun 2019 ditujukan pada:

- 1) Peningkatan kompetensi SDM aparatur;
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian untuk pengambilan kebijakan.

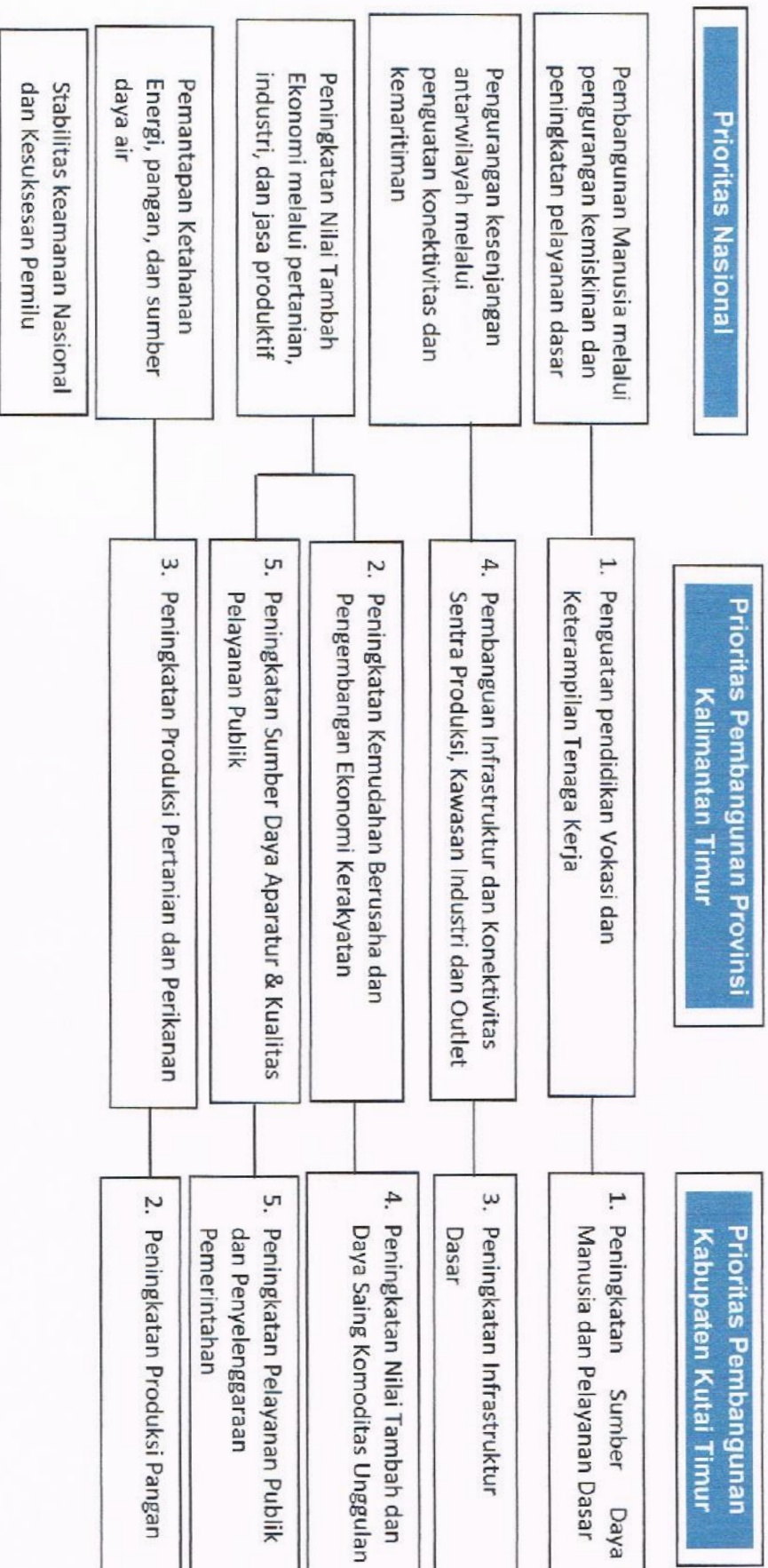
Penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana kegiatan perencanaan rutin yang sudah pernah dilakukan periode sebelumnya, selain harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya secara horisontal, seperti RPJPD Kutai Timur dan RPJMD periode 2016-2021, juga perlu mempertimbangkan harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal (Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur). Harmonisasi atau sinkronisasi tersebut, dimaksudkan agar diperoleh integrasi dan sinergi prioritas program-program pembangunan. Dalam konteks nasional, pembangunan daerah merupakan upaya mendukung pemerintah pusat serta mengingat pada dasarnya rencana-rencana yang ada erat satu sama lainnya dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Dalam konteks regional, Kabupaten Kutai Timur menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur sehingga arah pembangunan harus juga sejalan.



Sinkronisasi/harmonisasi prioritas pembangunan nasional, Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur disajikan pada Gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1
Keterpaduan Prioritas Pembangunan
Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur



Sumber: - Rancangan RKP Tahun 2019, - Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



BAB 5

PENDANAAN DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas), infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri atas :

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sosial;
- 5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu:

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika
- 11) Koperasi dan UKM;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan;
- 18) Arsip

c) Urusan Pilihan, yaitu :

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Transmigrasi

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu Indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.



**Bab 5 Pendanaan Daerah Dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perubahan RKKPD Tahun 2019
Kabupaten Kutai Timur

Kode	Urusan/OPD	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.646.386.602.151,00	1.646.386.602.151,00	0,00	0,00
1.01	Pendidikan	195.549.878.141,00	195.549.878.141,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan	195.549.878.141,00	195.549.878.141,00	0,00	0,00
1.02	Kesehatan	247.467.927.949,00	247.467.927.949,00	0,00	0,00
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	188.919.581.860,00	188.919.581.860,00	0,00	0,00
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Sengatta	58.548.346.089,00	58.548.346.089,00	0,00	0,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.139.267.936.216,00	1.139.267.936.216,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.086.485.936.216,00	1.086.485.936.216,00	0,00	0,00
1.03.1.03.02	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	52.782.000.000,00	52.782.000.000,00	0,00	0,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	46.186.657.845,00	46.186.657.845,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46.186.657.845,00	46.186.657.845,00	0,00	0,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	13.361.910.000,00	13.361.910.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.671.910.000,00	6.671.910.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
1.05.1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	0,00	0,00
1.06	Sosial	4.552.292.000,00	4.552.292.000,00	0,00	0,00
1.06.1.06.01	Dinas Sosial	4.552.292.000,00	4.552.292.000,00	0,00	0,00



**Bab 5 Rencana Kerja Dan
Pendanaan Daerah**

Kode	Urusan/OPD	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	97.543.872.985,00	97.543.872.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Tenaga Kerja	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.039.990.000,00	1.039.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.039.990.000,00	1.039.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Pangan	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Lingkungan Hidup	27.496.388.300,00	27.496.388.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	27.496.388.300,00	27.496.388.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	1.635.940.000,00	1.635.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.635.940.000,00	1.635.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.011.000.000,00	21.011.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.011.000.000,00	21.011.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.788.695.300,00	3.788.695.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.788.695.300,00	3.788.695.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	Perhubungan	6.443.736.385,00	6.443.736.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan	6.443.736.385,00	6.443.736.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	5.794.627.000,00	5.794.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik	5.794.627.000,00	5.794.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Bab 5 Pendanaan Daerah Dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Kode	Urusan/OPD	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	%
2.12	Penanaman Modal	4.234.451.500,00		4.234.451.500,00		0,00	0,00
2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.234.451.500,00		4.234.451.500,00		0,00	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	21.955.044.500,00		21.955.044.500,00		0,00	0,00
2.13.2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.955.044.500,00		21.955.044.500,00		0,00	0,00
2.16	Kebudayaan	780.000.000,00		780.000.000,00		0,00	0,00
2.16.2.16.01	Dinas Kebudayaan	780.000.000,00		780.000.000,00		0,00	0,00
2.17	Perpustakaan	704.000.000,00		704.000.000,00		0,00	0,00
2.17.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	704.000.000,00		704.000.000,00		0,00	0,00
2.18	Kearsipan	110.000.000,00		110.000.000,00		0,00	0,00
2.18.2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	110.000.000,00		110.000.000,00		0,00	0,00
3	Urusan Pilihan	21.924.288.967,00		21.924.288.967,00		0,00	0,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	2.402.637.396,00		2.402.637.396,00		0,00	0,00
3.01.3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.402.637.396,00		2.402.637.396,00		0,00	0,00
3.02	Pariwisata	1.311.140.000,00		1.311.140.000,00		0,00	0,00
3.02.3.02.01	Dinas Pariwisata	1.311.140.000,00		1.311.140.000,00		0,00	0,00
3.03	Pertanian	14.738.724.071,00		14.738.724.071,00		0,00	0,00
3.03.3.03.01	Dinas Pertanian	8.105.350.571,00		8.105.350.571,00		0,00	0,00
3.03.3.03.02	Dinas Perkebunan	6.633.373.500,00		6.633.373.500,00		0,00	0,00
3.07	Perindustrian	3.471.787.500,00		3.471.787.500,00		0,00	0,00
3.07.3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.471.787.500,00		3.471.787.500,00		0,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	507.083.811.062,00		507.083.811.062,00		0,00	0,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	191.461.655.928,00		191.461.655.928,00		0,00	0,00



**Bab 5 Rencana Kerja Dan
Pendanaan Daerah**

Kode	Urusan/OPD	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Berambah/Berkurang	
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	%
4.01.4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur	0,00		0,00		0,00	0,00
4.01.4.01.02	Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur	0,00		0,00		0,00	0,00
4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah	137.299.933.928,00		137.299.933.928,00		0,00	0,00
4.01.4.01.04	Sekretariat DPRD	41.431.722.000,00		41.431.722.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.05	Sekretariat KORPRI	240.000.000,00		240.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.06	Kantor Camat Sangatta Selatan	550.000.000,00		550.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.07	Kantor Camat Sangatta Utara	1.170.000.000,00		1.170.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.08	Kantor Camat Bengalon	550.000.000,00		550.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.09	Kantor Camat Kaliorang	550.000.000,00		550.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.10	Kantor Camat Muara Wahau	550.000.000,00		550.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.11	Kantor Camat Kongbeng	550.000.000,00		550.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.12	Kantor Camat Muara Ancalong	650.000.000,00		650.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.13	Kantor Camat Batu Ampar	650.000.000,00		650.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.14	Kantor Camat Telen	610.000.000,00		610.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.15	Kantor Camat Busang	800.000.000,00		800.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.16	Kantor Camat Teluk Pandan	550.000.000,00		550.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.17	Kantor Camat Rantau Pulung	550.000.000,00		550.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.18	Kantor Camat Kaubun	610.000.000,00		610.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.19	Kantor Camat Sangkulirang	650.000.000,00		650.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.20	Kantor Camat Muara Bengkal	650.000.000,00		650.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.21	Kantor Camat Long Mesangat	650.000.000,00		650.000.000,00		0,00	0,00
4.01.4.01.22	Kantor Camat Karanganyar	800.000.000,00		800.000.000,00		0,00	0,00



**Bab 5 Pendanaan Daerah Dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Kode	Urusan/OPD	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4.01.4.01.23	Kantor Camat Sandaran	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.24	Kelurahan Teluk Lingga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
4.01.4.01.25	Kelurahan Singa Geweh	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
4.02	Pengawasan	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00
4.02.4.02.01	Inspektorat Daerah	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00
4.03	Perencanaan	11.570.930.334,00	11.570.930.334,00	0,00	0,00
4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.570.930.334,00	11.570.930.334,00	0,00	0,00
4.04	Keuangan	295.515.536.000,00	295.515.536.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	251.605.536.000,00	251.605.536.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	43.910.000.000,00	43.910.000.000,00	0,00	0,00
4.05	Kepegawaian	6.283.188.800,00	6.283.188.800,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	6.283.188.800,00	6.283.188.800,00	0,00	0,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	992.500.000,00	992.500.000,00	0,00	0,00
4.07.4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	992.500.000,00	992.500.000,00	0,00	0,00



5.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil (*outcomes*) lebih utama daripada sekedar keluaran (*output*), karena hasil (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah dalam RKPD tahun 2019 merupakan target Bupati/Wakil Bupati periode ke-4 pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 yang harus diwujudkan dan didukung Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penetapan indikator kinerja daerah pada RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2019
Kabupaten Kutai Timur

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB	%	3,77	3,77
2	Laju Inflasi		Na	Na
3	PDRB Per Kapita		Na	Na
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	94,09	94,09
5	Indeks Pembangunan Desa	Indeks	57,89	57,89
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,47	72,47
7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,79	9,79
8	Angka Usia Harapan Hidup	Indeks	72,43	72,43
9	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	86	86
10	Persentase balita gizi buruk	%	0,129	0,129
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,83	1,83



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
12	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,52	61,52
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,52	61,52
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,46	2,46
15	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	96	96
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	59,06	59,06
17	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	%	17,97	17,97
18	Indeks kepuasan masyarakat		77,52	77,52
19	Persentase PAD terhadap pendapatan		na	na
20	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Point	90	90
22	Penguatan cadangan pangan	Ton	75	75
23	Penanganan daerah rawan pangan	%	1	1
24	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	8,7	8,7
25	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	0,66	0,66
26	Produksi sektor pertanian (Padi, Jagung, Ubi Kayu)	Ton/Ha	44.790	44.790
27	Kontribusi sektor perkebunan	%	5,97	5,97
28	Produksi sektor perkebunan (Karet, Lada, Kakao, Sawit, Aren dan Kelapa)	Ton/Ha	6.481.298,38	6.481.298,38
29	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	0,65	0,65
30	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	2,19	2,19
31	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	3,28	3,28
32	Pertumbuhan industri	%	38,4	38,4
II	ASPEK DAYASAING DAERAH			
1	Angka kriminalitas yang tertangani	%	0,24	0,24
2	Rasio ketergantungan		na	na
III	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Layanan Urusan Wajib Dasar			
A	Pendidikan			
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,48
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	78,04	78,04
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	112,19	112,19
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	106,67	106,67
5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	96,81	96,81
6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	80,26	80,26



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
7	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 7-12 Thn	%	105,18	105,18
8	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 13-15 Thn	%	97,77	97,77
9	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,04	0,04
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,1	0,1
11	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100
12	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100
13	Angka Melanjutkan SD/MI Ke SMP/MTs	%	94,17	94,17
14	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	100	100
15	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	100	100
16	Rasio Ketersediaan SD/MI Per Penduduk	Rasio	0,54	0,54
17	Rasio Ketersediaan SMP/MTs Per Penduduk	Rasio	0,60	0,60
18	Rasio Guru Dan Murid SD/MI	Rasio	5,74	5,74
19	Rasio Guru Dan Murid SMP/MTs	Rasio	6,52	6,52
20	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	100
21	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,99	98,99
22	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 Dan D-IV	%	92,93	92,93
B	Bidang Kesehatan			
1	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	11,26	11,26
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 KH	989,66	989,66
3	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	14,08	14,08
4	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	9,64	9,64
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	254,49	254,49
6	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio	7,6	7,6
7	Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	0,46	0,46
8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	0,02	0,02
9	Rasio Dokter Per satuan Penduduk	Rasio	0,29	0,29
10	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Rasio	0,52	0,52
11	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	%	80	80
12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	85	85
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	92	92
14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak		100	100



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
16	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	85	85
17	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		251	251
18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	1	1
19	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	85	85
20	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	95	95
21	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100
22	Penderita diare yang ditangani	%	100	100
23	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk beresiko	<1	<1
24	Tingkat kematian akibat malaria		<1	<1
25	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	<2	<2
26	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100
27	Cakupan puskesmas	%	116,67	116,67
28	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	75	75
29	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	82	82
30	Cakupan pelayanan nifas	%	85	85
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100
32	Cakupan pelayanan anak balita	%	75	75
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	80	80
34	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100
35	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100
C	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	53,62	53,62
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	85,6	85,6
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,96	0,96
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	85,68	85,68
5	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	48,2	48,2
6	Rasio jaringan Irigasi	%	16,35	16,35
7	Persentase penduduk berakses air minum	%	30,68	30,68



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		32,56	32,56
9	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		1,3	1,3
10	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Rasio	0,0099	0,0099
	Penataan Ruang			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	30	30
2	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	20	20
3	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan	%	65	65
4	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	100
D	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Rasio Rumah layak huni		0,27	0,27
2	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	1,77	1,77
E	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0,42	0,42
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	88,89	88,89
4	Persentase Penegakan PERDA	%	62,86	62,86
F	Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	78,79	78,79
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	86,79	86,79
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	10,07	10,07
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	1,37	1,37
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	55,59	55,59
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
A	Bidang Ketenagakerjaan			
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	26,69	26,69
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	92,54	92,54
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	57,54	57,54
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	35,63	35,63
5	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	3,7	3,7
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	40	40
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	30	30
3	Rasio KDRT		1,5	1,5
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah Sakit	%	30	30
6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	25	25
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100
9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	2	2
10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	20	20



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
C	Bidang Pangan			
1	Ketersediaan Pangan Utama	%	93	93
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			
	-Energi	Kkal/Kap/Hr	2.442	2.442
	-Protein	Gram/Kap/Hr	77	77
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	80
4	Regulasi Ketahanan Pangan	Perda/ Perkada	2	2
D	Bidang Pertanahan			
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	80	80
2	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100
E	Bidang Lingkungan Hidup			
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	IKA	70	70
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	IKU	70	70
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	IKTL	70	70
4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	20	20
5	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	1	1
6	Penetapan hak MHA	MHA	1	1
7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Piagam/piala	25	25
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	50	50
9	Timbulan sampah yang ditangani	%	80	80
10	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	5	5
11	Persentase cakupan area pelayanan	%	5	5
12	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai Adipura	75	75
F	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	85	85



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
2	Rasio pasangan berakte nikah	%	86	86
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,7	99,7
G	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	rerata	100	100
3	Persentase PKK Aktif	%	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	%	100	100
H	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,3	2,3
2	Total Fertility Rate (TFR)		2,28	2,28
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	72	72
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	2,8	2,8
5	Rasio akseptor KB	%	44	44
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	64,87	64,87
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	per 1.000 kelahiran	35	35
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,04	1,04
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,85	14,85
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14,85	14,85
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	27,17	27,17
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	92	92
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	76,4	76,4
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	17	17
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	18	18
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	70	70
17	Cakupan PUS peserta KB anggota	%	90	90



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri			
18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	64,87	64,87
19	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	19	19
20	Presentasi Pembiayaan Program Kependudukan/Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	0,0085	0,0085
I	Bidang Perhubungan			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	143.227	143.227
2	Rasio ijin trayek	%	0,00022	0,00022
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	7.936	7.936
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis			
	- Pelabuhan laut	Unit	3	3
	- Pelabuhan Udara	Unit	2	2
	- Terminal Bis	Unit	12	12
5	Persentase Layanan Angkutan darat	%	22,7	22,7
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	26,19	26,19
7	Pemasangan rambu-rambu	%	69,04	69,04
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			
	- Jumlah Orang	Orang	203.187	203.187
	- Jumlah Barang	Ton	786	786
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun			
	- Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal	Orang	102.510	102.510
	- Jumlah Barang melalui dermaga/bandara/terminal	Ton	786	786
J	Bidang Komunikasi dan Informatika			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	10	10
2	Cakupan layanan telekomunikasi	%	40	40
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	83	83
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	40	40



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
K	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
1	Persentase Koperasi Aktif	%	65,9	65,9
2	Jumlah UKM	Unit	5.972	5.972
L	Bidang Penanaman Modal			
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	28	28
2	Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (M)	25.482,00	25.482,00
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	25.784	25.784
M	Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	73	73
2	Persentase wirausaha muda		60	60
3	Jumlah prestasi olahraga		185	185
N	Bidang Statistik			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada
O	Bidang Persandian			
P	Bidang Kebudayaan			
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Keg	15	15
2	Jumlah Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	55	55
3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	4
P	Bidang Perpustakaan			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,14	0,14
2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan	Judul	0,33	0,33
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,25	0,25
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	40.500	40.500
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku	32.708	32.708
Q	Bidang Kearsipan			



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0,19	0,19
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali	1	1
III Fokus Layanan Urusan Pilihan				
A Bidang Pariwisata				
1	Kunjungan Wisata	Orang	27.206	27.206
B Bidang Pertanian				
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	8,7	8,7
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	0,66	0,66
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kw/ha		
	a. Padi	kw/ha	37,25	37,25
	b. Jagung	kw/ha	21,59	21,59
	c. Ubi Kayu	kw/ha	140,6	140,6
4	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			
	a. Padi	Ton/Ha	38.000	38.000
	b. Jagung	Ton/Ha	1.300	1.300
	c. Ubi Kayu	Ton/Ha	5.490	5.490
5	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	27,02	27,02
6	Kontribusi sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	%	5,97	5,97
7	Produksi sektor Perkebunan (Karet, Lada, Kakao, Sawit, Aren dan Kelapa)	Ton/Ha	6.481.298,38	6.481.298,38
8	Luas Lahan Perkebunan (Ha)			
	1.Karet	Ha	16.645,49	16.645,49
	2.Lada	Ha	467,18	467,18
	3.Kakao	Ha	4.049,41	4.049,41
	4.Sawit	Ha	484.056,18	484.056,18
	5.Aren	Ha	326,17	326,17
	6.Kelapa Dalam	Ha	1.372,85	1.372,85
9	Produksi Perkebunan (Ton/Ha)			
	1.Karet	Ton/Ha	16.645,49	16.645,49
	2.Lada	Ton/Ha	467,18	467,18
	3.Kakao	Ton/Ha	1.618,87	1.618,87
	4.Sawit	Ton/Ha	6.477.166,48	6.477.166,48
	5.Aren	Ton/Ha	35,94	35,94
	6.Kelapa Dalam	Ton/Ha	1.138,62	1.138,62



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
10	Produktivitas Perkebunan (kg/Ha)			
	1.Karet	Kg/Ha	1.321,34	1.321,34
	2.Lada	Kg/Ha	821,67	821,67
	3.Kakao	Kg/Ha	648,79	648,79
	4.Sawit	Kg/Ha	20.501,24	20.501,24
	5.Aren	Kg/Ha	367,98	367,98
	6.Kelapa Dalam	Butir/Ha	1.166,95	1.166,95
11	Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan (Tanaman Keras)	%	16,38	16,38
12	Populasi Ternak (Ekor)			
	1.Sapi	Ekor	17.647	17.647
	-Sapi Potong	Ekor	17.566	17.566
	-Sapi Perah	Ekor	81	81
	2.Babi	Ekor	10.243	10.243
	3.Kambing	Ekor	9.825	9.825
	4.Ayam:	Ekor	3.380.132	3.380.132
	-Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.923.833	2.923.833
	-Ayam Buras (kampung)	Ekor	456.229	456.229
13	Produksi Ternak			
	1. Sapi	Ton	610	610
	-Sapi Potong	Ton	610	610
	2.Babi	Ton	345	345
	3.Kambing	Ton	57	57
	4.Ayam:	Ton	2.717	2.717
	-Ayam Ras Pedaging	Ton	2.250	2.250
	-Ayam Buras (kampung)	Ton	467	467
C	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	94	94
D	Perdagangan			
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp (juta)	109.353.118	109.353.118
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	2	2
E	Perindustrian			
1	Rekapitulasi pertumbuhan IKM Kab. Kutim	%	1.369	1.369
2	Rekapitulasi IKM Yang Mendapatkan Bantuan peralatan /sarana dan prasarana	Jumlah	30	30
3	Rekapitulasi IKM yang mendapatkan pembinaan/pelatihan	orang	150	150



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
F	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi Perikanan (Dalam Ribuan)	Ton	11.466,28	11.466,28
2	Konsumsi Ikan	kg/tahun	43,57	43,57
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	14,72	14,72
IV	Urusan Penunjang			
A	Perencanaan Pembangunan			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
B	Keuangan			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1	1
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	3	3
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	min 10	min 10
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	min 5	min 5
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	na	na
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	min 5	min 5
8	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
C	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari	28	28
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,37	1,37
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	10,69	10,69
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	1.076	1.076



No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja	
			RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	39	39
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	67	67
D	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana keltbangan	%	50	50
E	Pengawasan			
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	85	82
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,32	0,24
3	Jumlah temuan BPK	kasus	47	50



BAB 6

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2019. Berdasarkan KUPA dan P-PAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 tetap difokuskan pada optimalisasi pencapaian target sasaran indikator kinerja hingga tahun 2019 sebagai pelaksanaan ketiga RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021. Selain itu, perubahan RKPD diarahkan pada program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam RKPD sebelum perubahan tahun 2019.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;
2. Bila terdapat adanya perubahan, maka Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;



3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2019.
4. Pada akhir tahun anggaran 2019 setiap Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD dan perubahan RKPD Tahun 2019.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR